

Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan 2025



**Mahkamah Agung
Republik Indonesia**



Pengadilan Terpercaya,
Rakyat Sejahtera



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ringkasan Eksekutif **LAPORAN TAHUNAN 2025**

Pengadilan Terpercaya, Rakyat Sejahtera



Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.
Ketua Mahkamah Agung RI



H. Suharto, S.H., M.Hum.
Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial



Dr. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum
Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial



I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.
Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI



Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.
Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI



Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M. Ph.D.
Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI



Dr. Yasardin, S.H., M.Hum.
Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI



Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H
Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI



Brigjen TNI (Purn.) Hidayat Manao, S.H., M.H.
Ketua Kamar Pidana Militer Mahkamah Agung RI
(Dilantik 12 Maret 2025)



Prof. Dr. Yanto, SH., M.H.
Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung
(Dilantik 7 Januari 2026)

Daftar Isi

7	PENJELASAN TEMA	43	APRESIASI DAN PEMBERDAYAAN SDM UNGGUL
8	BAB 1	43	PROGRAM ISU SPESIFIK DAN KELOMPOK
	MANAJEMEN PERKARA		APARATUR TERTENTU
8	PROGRAM PEMBARUAN	44	KOMPOSISI PEGAWAI
9	PERKEMBANGAN KEADAAN PERKARA DI MAHKAMAH AGUNG	46	BAB 4
16	PERKEMBANGAN KEADAAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT BANDING DAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA		MANAJEMEN KEUANGAN, ASET, DAN TEKNOLOGI INFORMASI
29	PENYELESAIAN PERKARA MELALUI MEDIASI, DIVERSI, DAN PENDEKATAN Keadilan Restoratif	46	PROGRAM PEMBARUAN
30	KINERJA PENANGANAN PERKARA MELALUI LAYANAN PENGADILAN ELEKTRONIK	47	MANAJEMEN KEUANGAN
31	AKSEPTABILITAS PUTUSAN PENGADILAN	49	MANAJEMEN ASET
33	PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN	49	MANAJEMEN TEKNOLOGI INFORMASI
33	PENANGANAN PERKARA PERDATA LINTAS NEGARA	50	BAB 5
35	RASIO BEBAN DAN KINERJA PENANGANAN PERKARA		ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM DAN PERADILAN SERTA PUTUSAN PENTING (LANDMARK DECISION)
36	KONTRIBUSI KEUANGAN PERKARA TERHADAP KEUANGAN NEGARA	50	PROGRAM PEMBARUAN
38	BAB 2	50	PENYUSUNAN REKOMENDASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN
	REFORMASI BIROKRASI DAN AKSES TERHADAP Keadilan	52	ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PUBLIKASI
38	PROGRAM PEMBARUAN	52	PUBLIKASI
39	AKSES TERHADAP Keadilan DAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	53	LANDMARK DECISION
41	BAB 3	56	BAB 6
	MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA		PENGAWASAN
41	REFORMASI DALAM KEBIJAKAN SDM	56	PROGRAM PEMBARUAN
41	PEMBINAAN INTEGRITAS DAN PENGAWASAN	56	PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN
42	PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KAPASITAS SDM	58	PENGELOLAAN SISTEM PENGAWASAN
		61	BAB 7
			PERAN SERTA DAN KERJA SAMA
		61	KERJASAMA MULTILATERAL
		62	KERJASAMA BILATERAL
		64	KUNJUNGAN KERJA



Pengadilan Terpercaya, Rakyat Sejahtera

Tema ini merefleksikan nilai dasar dan arah kebijakan Mahkamah Agung dalam mewujudkan peradilan yang berintegritas dan berpihak pada kepentingan masyarakat pencari keadilan. Makna “Pengadilan Terpercaya” menegaskan kewajiban lembaga peradilan untuk menjunjung tinggi integritas dan independensi dalam setiap penyelenggaraan penegakan hukum. Sejalan dengan hal tersebut, Mahkamah Agung dalam beberapa tahun terakhir secara konsisten menempatkan penguatan integritas sebagai agenda utama reformasi peradilan guna menjamin tegaknya keadilan dan terpeliharanya kepercayaan publik. Kepercayaan publik terbentuk melalui konsistensi sikap aparaturnya peradilan serta penyelenggaraan proses peradilan yang objektif dan berkeadilan. Pengadilan yang terpercaya, dengan demikian, adalah pengadilan yang mampu memberikan kepastian hukum dan menjamin kesetaraan di hadapan hukum sehingga setiap putusan yang dihasilkan memiliki legitimasi dan memenuhi rasa keadilan.



Bab 1

MANAJEMEN PERKARA

PROGRAM PEMBARUAN

Pembaruan Bidang Teknis

1. Pengaturan Pedoman Mengadili Perkara Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum, melalui PERMA Nomor 2 Tahun 2025.
2. Pengaturan Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, melalui PERMA Nomor 3 Tahun 2025.
3. Pengaturan Tata Cara Mengadili Gugatan yang Diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen, melalui PERMA Nomor 4 Tahun 2025.
4. Pemberian Petunjuk Prosedur Penentuan Hari dan Tanggal Diketuinya Kebohongan atau Tipu Muslihat Pihak Lawan yang Dijadikan Alasan Peninjauan Kembali sesuai Pasal 67 (a) UU Mahkamah Agung, melalui Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 835/PAN/HK2/VIII/2025 tanggal 8 Agustus 2025 yang ditujukan kepada ketua pengadilan tingkat pertama dan ketua pengadilan tingkat banding.
5. Pemberlakuan Rumusan Hukum Kesepakatan Pleno Kamar, melalui SEMA Nomor 1 Tahun 2025
6. Penyusunan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Hak Cipta, yang diluncurkan pada 27 Februari 2025.
7. Penyempurnaan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Bagi Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung, yang akan diberlakukan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung
8. Penyusunan Buku Pedoman Restitusi dalam Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang, buku tersebut memberlakukan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 254/KMA/SK.HK2.2/XII/2025 tanggal 29 Desember 2025.

Pembaruan Bidang Manajemen Perkara

1. Penyempurnaan Berkelanjutan Sistem Pengajuan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, sebagai berikut:
 - a. Penyampaian laporan kasasi perkara pidana, perkara jinayat dan pidana militer yang terdakwa berada dalam tahanan dapat diajukan secara elektronik melalui aplikasi SIPP pada hari yang sama dengan pengajuan kasasi. Prosedur baru ini diberlakukan dengan Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 633/PAN/HK2/VI/2025 tanggal 23 Juni 2025.
 - b. Penanganan permohonan pembetulan salinan putusan Mahkamah Agung yang memuat kesalahan redaksional (*renvoi*) dapat diproses secara elektronik melalui aplikasi SIAP-MA.
 - c. Penyempurnaan visualisasi salinan putusan Mahkamah Agung yang ditandatangani secara elektronik. Tampilan baru tersebut mulai berlaku 16 Oktober 2025.
 - d. Pengembangan fitur sistem informasi eksekutif pada SIAP-MA untuk user pimpinan, hakim agung, pejabat kepaniteraan, dan panitera pengganti.
2. Pencegahan dan Penanganan Konflik Kepentingan dalam Penanganan Perkara, melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 15/KMA/SK.HK2/II/2025 tanggal 10 Februari 2025.
3. Penyesuaian Besaran Biaya Proses untuk Perkara Kasasi/Peninjauan Kembali Diajukan Secara Elektronik, melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 140/KMA/SK.HK2/VIII/2025 tanggal 13 Agustus 2025.
4. Pemberlakuan Pendaftaran dan Pembayaran Biaya Perkara HUM Secara Elektronik, berdasarkan Surat Keputusan Panitera Mahkamah Agung Nomor 872/PAN/HK2/SK/SK/VIII/2025 tanggal 14 Agustus 2025.
5. Penyusunan Aturan Penanganan Perkara Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak yang Diajukan Melalui e-Tax Court melalui Surat Keputusan Panitera Mahkamah Agung Nomor 1467A/PAN/HK2.7/SK/XII/2025 tanggal 1 Desember 2025.
6. Pengembangan Fitur Putusan Populer pada Direktori Putusan untuk Menjaring Kandidat Putusan Penting (*landmark decision*). Fitur ini menjadi instrumen untuk menjaring kandidat putusan penting (*landmark decision*).
7. Penerapan Sistem Penunjukan Majelis dengan Bantuan Akal Imitasi (AI) dalam Penanganan Perkara Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding

PERKEMBANGAN KEADAAN PERKARA DI MAHKAMAH AGUNG

Gambaran Umum Penanganan Perkara Tahun 2025

Tabel Keadaan Perkara Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun 2025

Peradilan	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Cabut	Sisa 2025	%
Mahkamah Agung	230	37.918	38.148	37.973	0	175	99,54%
Pengadilan Tk Banding	3.271	37.714	40.985	36.522	56	4.407	89,25%
Pengadilan Tk Pertama	73.122	2.849.505	2.922.627	2.778.855	68.795	74.977	97,43%
Pengadilan Pajak	8.044	15.348	23.392	15.333	100	7.959	65,98%
Jumlah	84.667	2.940.485	3.025.152	2.868.683	68.951	87.518	97,11%

Tabel Keadaan Perkara Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan Tahun 2025

Lingkungan Peradilan	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Cabut	Sisa 2025	% Penyelesaian
Peradilan Umum	42.277	2.178.682	2.220.959	2.168.669	5.694	46.596	97,90%
Peradilan Agama	29.982	666.206	696.188	606.112	62.561	27.515	96,05%
Peradilan Militer	191	2.348	2.539	2.331	1	207	91,85%
Peradilan TUN	672	2.269	2.941	1.743	539	659	77,59%
Jumlah	73.122	2.849.505	2.922.627	2.778.855	68.795	74.977	97,43%

Tabel Keadaan Perkara Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan Tahun 2025

Lingkungan Peradilan	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Cabut	Sisa 2025	%
Peradilan Umum	3.096	32.933	36.029	31.808	0	4.221	88,28%
Peradilan Agama	23	3.434	3.457	3.395	36	26	99,25%
Peradilan Militer	43	407	450	382	19	49	89,11%
Peradilan TUN	109	940	1.049	937	1	111	89,42%
Pengadilan Pajak	8.044	15.348	23.392	15.333	100	7.959	65,98%
Jumlah	11.315	53.062	64.377	51.855	156	12.366	80,79%

Tabel Keadaan Perkara Mahkamah Agung dan Pengadilan dari Empat Lingkungan Peradilan

Lingkungan Peradilan	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Cabut	Sisa 2025	% Putus
Mahkamah Agung	230	37.918	38.148	37.973	0	175	99,54%
Peradilan Umum	45.373	2.211.615	2.256.988	2.200.477	5.694	50.817	97,75%
Peradilan Agama	30.005	669.640	699.645	609.507	62.597	27.541	96,06%
Peradilan Militer	234	2.755	2.989	2.713	20	256	91,44%
Peradilan TUN	781	3.209	3.990	2.680	540	770	80,70%
Pengadilan Pajak	8044	15.348	23.392	15.333	100	7.959	65,98%
Jumlah	84.667	2.940.485	3.025.152	2.868.683	68.951	87.518	97,11%

Gambaran Umum Kinerja Penanganan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2025

Data Keadaan Perkara

Tabel Keadaan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2025 berdasarkan Jenis Perkara

No	Jenis Perkara	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Sisa 2025	Rasio Produktivitas
1	Pidana	0	2.474	2.474	2.474	0	100%
2	Pidana Khusus	5	15.917	15.922	15.922	0	100%
3	Perdata	81	7.945	8.026	7.882	144	98,21%
4	Perdata Khusus	9	1.450	1.459	1.457	2	99,86%
5	Perdata Agama/Jinayah	0	1.208	1.208	1.208	0	100%
6	Pidana Militer	0	318	318	318	0	100%
7	Tata Usaha Negara	135	8.606	8.741	8.712	29	99,67%
	Jumlah	230	37.918	38.148	37.973	175	99,54%

Tabel Keadaan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Kewenangan

No	Jenis Kewenangan	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Sisa 2025
A	Perkara					
1	Kasasi	118	24.518	24.635	24.512	123
2	Peninjauan Kembali	89	5.766	5.860	5.821	39
3	Peninjauan Kembali Perkara Pajak	10	7.500	7.510	7.509	1
4	Grasi	1	70	71	71	0
5	Hak Uji Materiel (PPU)	8	61	69	57	12
6	Permohonan Uji Pendapat	0	0	0	0	0
7	Pelanggaran Administrasi Pemilihan	0	3	3	3	0
	Jumlah	230	37.918	38.148	37.973	175
C	Lainnya					
	Permohonan Fatwa	0	11	11	11	0
	Sengketa Kewenangan Mengadili	0	3	3	2	1

Rasio Penyelesaian Perkara (clearance rate)

Tabel Rasio Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung Tahun 2025

No	Jenis Perkara	Jumlah Masuk	Jumlah Kirim	%
1	Pidana	2.474	2.338	94,50%
2	Pidana Khusus	15.917	15.286	96,04%
3	Perdata	7.945	8.276	104,17%
4	Perdata Khusus	1.450	1.352	93,24%
5	Perdata Agama/Jinayah	1.208	1.103	91,31%
6	Pidana Militer	318	308	96,86%
7	Tata Usaha Negara	8.606	8.268	96,07%
	Jumlah	37.918	36.931	97,40%

Rerata Waktu Memutus

Tabel Rerata Waktu Memutus Perkara pada Tingkat Pemeriksaan Mahkamah Agung Tahun 2025

No	Jenis Perkara	Lamanya Pemeriksaan (dalam bulan)					Jumlah
		1 s.d. 3	3 s.d. 6	6 s.d. 12	12 s.d. 24	> 24	
1	Pidana	2.473	1	0	0	0	2.474
2	Pidana Khusus	15.907	10	3	1	1	15.922
3	Perdata	7.812	48	19	3	0	7.882
4	Perdata Khusus	1.443	8	6	0	0	1.457
5	Perdata Agama/Jinayah	1.206	2	0	0	0	1.208
6	Pidana Militer	317	1	0	0	0	318
7	Tata Usaha Negara	8.633	68	4	1	6	8.712
	Jumlah	37.791	138	32	5	7	37.973
	%	99,52%	0,36%	0,08%	0,01%	0,02%	

Rerata Waktu Minutasi

Tabel Rerata Waktu Minutasi Perkara Mahkamah Agung Tahun 2025

No	Jenis Perkara	Lamanya Proses Minutasi (dalam bulan)					Jumlah
		1 sd 3	3 s.d 6	6 sd 12	12 sd 24	> 24	
1	Pidana	2.265	21	18	15	19	2.338
2	Pidana Khusus	14.923	192	73	38	60	15.286
3	Perdata	7.609	623	42	2	0	8.276
4	Perdata Khusus	1.281	63	8	0	0	1.352
5	Perdata Agama/Jinayah	1.096	7	0	0	0	1.103
6	Pidana Militer	307	1	0	0	0	308
7	Tata Usaha Negara	8.247	14	7	0	0	8.268
	Jumlah	35.728	921	148	55	79	36.931
	%	96,74%	2,49%	0,40%	0,15%	0,21%	

Tabel Rekapitulasi Perkara Aktif pada Akhir Tahun 2025

No	Kategori	Tahun 2024	Tahun 2025	Perbandingan 2024-2025
1	Belum Putus	230	175	-23,91%
2	Sudah Putus Belum Minutasi	4.900	5364	9,47%
3	Sudah Minutasi Belum Kirim	0	0	0
	Jumlah	5.130	5539	7,97%
4	Perkara aktif yang berkategori tunggakan	483	241	-50,10%
5	Persentase tunggakan dalam perkara aktif	9,42%	4,35%	-53,79%

Pemohon Upaya Hukum dalam Perkara Pidana

Tabel Klasifikasi Pemohon Upaya Hukum Kasasi dalam Perkara Pidana Umum, Pidana Khusus, dan Pidana Militer Tahun 2025

No	Pemohon	Pidana Umum		Pidana Khusus		Pidana Militer	
		Kasasi	%	Kasasi	%	Kasasi	%
1.	Terdakwa	381	17,24%	4.923	39,79%	188	66,90%
2.	Jaksa/Oditur	1.373	62,13%	3.736	30,20%	80	28,47%
3.	Terdakwa dan Jaksa/Oditur	456	20,63%	3.713	30,01%	13	4,63%
	Jumlah	2.210		12.372		281	

Keadaan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Tiap-Tiap Kamar Perkara Tahun 2025

Keadaan Perkara pada Kamar Pidana

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Kamar Pidana Tahun 2025

No	Jenis Perkara	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Sisa Akhir
A	Pidana Umum					
1	Kasasi Pidana Umum	0	2.210	2.210	2.210	0
2	PK Pidana Umum	0	254	254	254	0
3	Grasi Pidana Umum	0	10	10	10	0
	Sub jumlah	0	2.474	2.474	2.474	0
B	Pidana Khusus					
1	Kasasi Pidana Khusus	1	12.385	12.386	12.386	0
2	PK Pidana Khusus	3	3.474	3.477	3.477	0
3	Grasi Pidana Khusus	1	58	59	59	0
	Subjumlah	5	15.917	15.922	15.922	0
	Total Jumlah A + B	5	18.391	18.396	18.396	0

Keadaan Perkara pada Kamar Perdata

Tabel Keadaan Perkara pada Kamar Perdata MA Tahun 2025

Jenis Perkara	Sisa 2024		Masuk 2025		Jumlah Beban		Putus 2025		Sisa Akhir	
	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK
Perdata	14	67	6.395	1.550	6.409	1.617	6.299	1.583	110	34
Perdata Khusus	7	2	1.398	52	1.405	54	1.405	52	0	2
Jumlah	21	69	7.793	1.602	7.814	1.671	7.704	1.635	110	36
	90		9.395		9.485		9.339		146	

Keadaan Perkara Pada Kamar Agama

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara pada Kamar Agama Tahun 2025

Jenis Perkara	Sisa 2024		Masuk 2025		Beban		Putus 2025		Sisa Akhir	
	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK
Perdata Agama	0	0	1.004	171	1.004	171	1.004	171	0	0
Jinayah	0	0	31	2	31	2	31	2	0	0
Jumlah	0	0	1.035	173	1.035	173	1.035	173	0	0
	0		1.208		1.208		1.208		0	

Keadaan Perkara Pada Kamar Militer

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara pada Kamar Militer Tahun 2025

Jenis Perkara	Sisa 2024	Masuk 2025	Beban	Putus 2025	Sisa 2025
Kasasi	0	281	281	281	0
Peninjauan Kembali	0	35	35	35	0
Grasi	0	2	2	2	0
Jumlah	0	318	318	318	0

Keadaan Perkara Pada Kamar Tata Usaha Negara

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara pada Kamar Tata Usaha Negara

Jenis Perkara	Sisa 2024	Masuk 2025	Beban	Putus 2025	Sisa Akhir
Kasasi TUN	95	814	909	896	13
Peninjauan Kembali TUN	22	228	250	247	3
Peninjauan Kembali Perkara Pajak	10	7.500	7.510	7.509	1
Permohonan Hak Uji Materiel (HUM)	8	61	69	57	12
Permohonan Uji Pendapat	0	0	0	0	0
Pelanggaran Administrasi Pemilihan	0	3	3	3	0
Jumlah	135	8.606	8.741	8.712	29

Keadaan Perkara dan Permohonan Lainnya di luar Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali

Permohonan Grasi

Tabel Kinerja Penyelesaian Permohonan Grasi Tahun 2025

Jenis Perkara	Sisa 2024	Masuk 2025	Jml Beban	Diberikan Pertimbangan	Sisa 2025	% Penyelesaian
Pidana Umum	0	10	10	10	0	100%
Pidana Khusus	1	58	59	59	0	100%
Pidana Militer	0	2	2	2	0	100%
Jumlah	1	70	71	71	0	100%

Permohonan Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang (PPPU)

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Permohonan Hak Uji Materiel Tahun 2025

No.	Klasifikasi	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Sisa
1	Peraturan Menteri	3	14	17	15	2
2	Peraturan Pemerintah	1	12	13	11	2
3	Peraturan Presiden	1	8	9	4	5
4	Peraturan Daerah	3	3	6	6	0
5	Peraturan Kapolri	0	3	3	2	1
6	Keputusan Menteri	0	2	2	1	1
7	Peraturan Bupati	0	2	2	2	0
8	Peraturan DPR	0	2	2	2	0
9	Peraturan KPU	0	2	2	2	0
10	Peraturan Menteri Koordinator Ekonomi	0	2	2	2	0
11	Peraturan OJK	0	2	2	1	1
12	Peraturan Walikota	0	2	2	2	0
13	Surat Edaran Mahkamah Agung	0	2	2	2	0
14	Intruksi Presiden	0	1	1	1	0
15	Keputusan Bupati	0	1	1	1	0
16	Peraturan Gubernur	0	1	1	1	0
17	Peraturan Mahkamah Agung	0	1	1	1	0
18	Qanun	0	1	1	1	0
	Jumlah	8	61	69	57	12

Permohonan Sengketa Kewenangan Mengadili

Sepanjang tahun 2025, Mahkamah Agung menerima permohonan sengketa kewenangan mengadili sebanyak 3 perkara.

Permohonan Fatwa

No	Lembaga Pemohon	Jumlah
1	Kejaksaan Republik Indonesia	4
2	Pemerintah Daerah	3
3	Kementerian	3
4	BKN	1
	Jumlah	11

PERKEMBANGAN KEADAAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT BANDING DAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

Gambaran Umum Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Banding

Tabel Keadaan Perkara pada Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2025

Lingkungan Peradilan	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Cabut	Sisa 2025	% Penyelesaian
Peradilan Umum	3.096	32.933	36.029	31.808	0	4.221	3.096
Peradilan Agama	23	3.434	3.457	3.395	36	26	23
Peradilan Militer	43	407	450	382	19	49	43
Peradilan TUN	109	940	1.049	937	1	111	109
Pengadilan Pajak	8.044	15.348	23.392	15.333	100	7.959	8.044
Jumlah	11.315	53.062	64.377	51.855	156	12.366	11.315

Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tinggi

Perkara Pidana

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana pada Pengadilan Tinggi Tahun 2025

No	Klasifikasi	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Sisa 2025
1	Pidana Biasa	1.211	19.261	20.472	19.178	0
2	Tindak Pidana Korupsi	91	495	586	492	0
3	Pidana Khusus Anak	91	897	988	918	0
	Jumlah	1.393	20.653	22.046	20.588	0

Perkara Perdata

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Perdata pada Pengadilan Tinggi Tahun 2025

No	Klasifikasi	Sisa 2024	Masuk 2025	Beban Perkara	Putus 2025	Sisa 2025
1	Perbuatan Melawan Hukum	1013	5974	6987	5950	1037
2	Wanprestasi	283	1441	1724	1427	297
3	Penyalahgunaan Hak	4	1019	1023	999	24
4	Perceraian	172	629	801	632	169
5	Objek Sengketa Tanah	70	422	492	428	64
6	Objek Sengketa Bukan Tanah	5	422	427	428	-1
7	Ganti Rugi	28	88	116	86	30
8	Harta Bersama	22	74	96	75	21
9	Jual Beli Tanah	14	44	58	41	17
10	Sertifikat/Girik	2	15	17	16	1
11	Pusaka Tinggi/Pusaka Rendah	6	13	19	15	4
12	Yayasan	2	13	15	15	0
13	Hal-hal yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan	1	12	13	13	0
14	Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action)	1	12	13	13	0
15	Warisan/Wasiat	11	5	16	5	11
16	Hak Asuh Anak	1	5	6	5	1
17	Gugatan Terhadap Aktivis Lingkungan Hidup/ Warga/Masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup	0	5	5	5	0
18	Hibah	0	3	3	3	0
19	Anjak Piutang/Cessie	3	3	6	3	3
20	Jual Beli	3	2	5	2	3
21	Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit)	0	2	2	2	0
22	Koperasi	0	1	1	1	0
23	Sewa Menyewa	1	0	1	0	1
24	Penyerobotan	19	0	19	0	19
25	Gadai/Hipotik/Fiducia	2	0	2	0	2
26	Perlawanan	2	0	2	0	2
27	Perjanjian Borongan	0	0	0	0	0
28	Hak Ulayat/Persekutuan Adat	0	0	0	0	0
29	Hutang Piutang	1	0	1	0	1
30	Perseroan	0	0	0	0	0
31	Lain-Lain	37	2076	2113	1056	1057
	Jumlah	1703	12280	13983	11220	2763

Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tinggi Agama

Perkara Perdata Agama

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Perdata Agama pada Pengadilan Tinggi Agama Tahun 2025

No	Klasifikasi Perkara	Sisa Tahun 2024	Masuk Tahun 2025	Jumlah Beban Perkara	Putus 2025	Cabut	Sisa Tahun 2025
1	Cerai Gugat	5	1237	1242	1218	20	4
2	Cerai Talak	3	1003	1006	991	8	7
3	Kewarisan	5	372	377	371	2	4
4	Harta Bersama	6	335	341	334	3	4
5	Penguasaan Anak	1	88	89	86	1	2
6	Ekonomi Syariah	2	80	82	81	0	1
7	Hibah	0	35	35	34	0	1
8	Pembatalan Perkawinan	0	33	33	33	0	0
9	Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah	0	15	15	13	1	1
10	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0	13	13	13	0	0
11	Wakaf	0	13	13	12	0	1
12	Izin Poligami	0	5	5	5	0	0
13	Wasiat	0	5	5	5	0	0
14	Hak - hak bekas istri/kewajiban bekas Suami	0	3	3	3	0	0
15	Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri	0	1	1	1	0	0
16	Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu	0	1	1	1	0	0
17	Pengesahan Anak	0	1	1	1	0	0
18	Pencabutan Kekuasaan Wali	0	1	1	1	0	0
19	Lain-Lain	1	138	139	137	1	1
	Jumlah	23	3.379	3.402	3.340	36	26

Perkara Jinayah

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Jinayah pada Mahkamah Syar'iyah Aceh Tahun 2025

No	Klasifikasi Perkara	Sisa Tahun 2024	Masuk Tahun 2025	Jumlah Beban	Putus Tahun 2025	Sisa Tahun 2025
1	Pemeriksaan	0	41	41	41	0
2	Pelecehan Seksual	0	8	8	8	0
3	Maisir	0	3	3	3	0
4	Ikhtilath	0	2	2	2	0
5	Zina	0	1	1	1	0
6	Khamar	0	0	0	0	0
7	Khalwat	0	0	0	0	0
8	Liwath	0	0	0	0	0
		0	55	55	55	0

Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Militer Tinggi

Perkara Pengadilan Militer Utama

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana Militer (kejahatan) pada Pengadilan Militer Utama Tahun 2025

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Dikem Balikan	Sisa Akhir 2025
1	Penipuan	0	6	6	6	0	0
2	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	0	4	4	4	0	0
3	Kesusilaan	1	3	4	4	0	0
4	Korupsi	0	3	3	3	0	0
5	Perzinahan	0	3	3	3	0	0
6	Kejahatan terhadap asal usul dan perkawinan	0	2	2	2	0	0
7	Penyalahgunaan Kekuasaan	0	2	2	2	0	0
8	Ketidaktaatan Militer terhadap perintah dinas	0	1	1	1	0	0
9	Narkotika	0	1	1	1	0	0
10	Pemalsuan surat	0	1	1	1	0	0
11	Penadahan Militer	0	1	1	1	0	0
12	Penganiayaan Terhadap Bawahan	0	1	1	1	0	0
13	Perjudian	0	1	1	1	0	0
14	Kejahatan yang membahayakan Keamanan Umum bagi orang/barang	1	0	1	1	0	0
	Jumlah	2	29	31	31	0	0

Perkara Pengadilan Militer Tinggi

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana Militer pada Pengadilan Militer Tinggi Tahun 2025

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Dikem-Balikan	Sisa Akhir 2025
1	Narkotika	5	66	71	58	3	10
2	Penipuan	3	57	60	50	3	7
3	Desersi	1	32	33	25	4	4
4	Kesusilaan	7	30	37	34	2	1
5	Perzinahan	2	27	29	28	0	1
6	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	2	25	27	23	1	3
7	Penganiayaan	3	18	21	18	1	2
8	Ketidaktaatan Militer terhadap perintah dinas	0	14	14	12	1	1
9	Pembunuhan	2	11	13	12	0	1
10	Penggelapan	2	11	13	10	1	2

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Dikem-Balikan	Sisa Akhir 2025
11	Pencurian	3	10	13	12	0	1
12	Perlindungan Anak	0	10	10	7	1	2
13	THTI	0	7	7	7	0	0
14	Pencabulan	0	6	6	6	0	0
15	Penganiayaan Terhadap Bawahan	0	6	6	4	0	2
16	Senjata Api / Senjata Tajam	1	6	7	5	0	2
17	Korupsi	0	5	5	5	0	0
18	Pemalsuan surat	0	5	5	5	0	0
19	Insubordinasi	2	4	6	5	0	1
20	Kejahatan terhadap asal usul dan perkawinan	0	4	4	2	1	1
21	Penadahan Militer	0	4	4	4	0	0
22	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	0	3	3	3	0	0
23	Kepabeanan	0	2	2	1	0	1
24	Pemalsuan mata uang dan uang kertas	0	2	2	2	0	0
25	Penangkapan, Pengangkutan dan Perdagangan Satwa Liar	0	2	2	2	0	0
26	Perkosaan	0	2	2	2	0	0
27	Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	0	1	1	1	0	0
28	Penculikan	0	1	1	1	0	0
29	Pencurian Militer	0	1	1	1	0	0
30	Pengguguran Kandungan (Aborsi)	0	1	1	0	0	1
31	Penyalahgunaan Kekuasaan	0	1	1	1	0	0
32	Perikanan/Illegal Fishing	0	1	1	0	0	1
33	Pornografi	0	1	1	0	0	1
34	Kekerasan terhadap orang/barang	1	0	1	1	0	0
35	Pemerasan dan Pengancaman	2	0	2	1	1	0
36	Penghancuran / perusakan barang	1	0	1	1	0	0
37	Lain-lain	0	2	2	2	0	0
	Jumlah	37	376	413	349	19	45

Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Tahun 2025

No	Klasifikasi Perkara	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Cabut 2025	Sisa 2025
1	Pertanahan	47	451	498	444	1	53
2	Kepegawaian	7	93	100	93	0	7
3	Tindakan Administratif Pemerintah	20	83	103	95	0	8
4	Perijinan	5	63	68	63	0	5
5	Badan Hukum / Parpol	1	44	45	35	0	10
6	Kepala & Perangkat Desa	5	38	43	36	0	7
7	Tender/ Pengadaan Barang dan Jasa	1	8	9	8	0	1
8	Lingkungan Hidup	1	4	5	4	0	1
9	PAW	0	3	3	3	0	0
10	Ketenagakerjaan	0	2	2	2	0	0
11	Lain-lain	22	151	173	154	0	19
		940	1049	937	1	111	109

Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Pajak

Tabel Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Pajak Tahun 2025

Jenis Perkara	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah	Putus 2025	Dicabut	Sisa 2025	Rasio Produktivitas
Banding	7.818	12.674	20.492	13.106	32	7.354	64,11%
Gugatan	226	2.674	2.900	2.227	68	605	79,14%
Jumlah	8.044	15.348	23.392	15.333	100	7.959	65,98%

Gambaran Umum Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama

Tabel Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dari Empat Lingkungan Peradilan Tahun 2025

Lingkungan Peradilan	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Cabut	Sisa 2025	% Penyelesaian
Peradilan Umum	42.277	2.178.682	2.220.959	2.168.669	5.694	46.596	97,90%
Peradilan Agama	29.982	666.206	696.188	606.112	62.561	27.515	96,05%
Peradilan Militer	191	2.348	2.539	2.331	1	207	91,85%
Peradilan TUN	672	2.269	2.941	1.743	539	659	77,59%
Jumlah	73.122	2.849.505	2.922.627	2.778.855	68.795	74.977	97,43%

Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Umum

Perkara Pidana

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Tahun 2025

No	Jenis Perkara	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Dicabut	Sisa 2025	Rasio Produktivitas
1.	Pidana Biasa	21.781	124.860	146.641	123.522	0	23.119	84,23%
2.	Pidana Singkat	23	106	129	109	0	20	84,50%
3.	Pidana Cepat	125	13.411	13.536	13.410	0	126	99,07%
4.	Pelanggaran Lalu Lintas	0	1.891.788	1.891.788	1.891.788	0	0	100,00%
5.	Praperadilan	147	1.843	1.990	1.843	102	45	92,61%
6.	Perikanan	4	40	44	39	0	5	88,64%
7.	Tipikor	1.658	2.544	4.202	2.222	0	1.980	52,88%
8.	Pidana Anak	864	4.549	5.413	4.515	0	898	83,41%
	Jumlah	24602	2039141	2063743	2037448	102	26193	98,73%

Perkara Perdata

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Tahun 2025

No	Jenis Perkara	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Cabut 2025	Sisa	% Penyelesaian
1.	Perdata Gugatan	14.633	48.658	63.291	43.621	2.779	16.891	73,31%
2.	Perdata Permohonan	902	78.555	79.457	76.327	1.866	1.264	98,41%
3.	Gugatan Sederhana	691	7.597	8.288	7.065	612	611	92,63%
4.	Perlawanan (Derden Verzet)	588	1.551	2.139	1.299	155	685	67,98%
	Jumlah	16.814	136.361	153.175	128.312	5.412	19.451	87,30%

Perkara pada Pengadilan Khusus

Tabel Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Khusus di Lingkungan Peradilan Umum

No	Pengadilan Khusus	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Cabut 2025	Sisa 2025
1	Tipikor	1.658	2.544	4.202	2.222	0	1.980
2	PHI	586	2.248	2.834	2.121	74	639
3	Niaga	275	932	1.207	788	106	313
4	Perikanan	4	40	44	39	0	5
5	HAM	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	2.523	5.764	8.287	5.170	180	2.937

Perkara Praperadilan

Tabel Data Penanganan Perkara Praperadilan pada Pengadilan Negeri Tahun 2025

No	Jenis Perkara	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Cabut 2025	Sisa 2025
1	Sah atau tidaknya penetapan tersangka	59	1138	1197	66	1068	63
2	Sah atau tidaknya penghentian penyidikan	22	248	270	12	247	11
3	Sah atau tidaknya penyitaan	8	231	239	15	209	15
4	Sah atau tidaknya penangkapan	9	106	115	11	99	5
5	Sah atau tidaknya penahanan	6	39	45	1	39	5
6	Sah atau tidaknya penggeledahan	0	18	18	3	13	2
7	Ganti kerugian dan rehabilitasi	1	13	14	0	13	1
8	Ganti kerugian	3	13	16	0	14	2
9	Sah atau tidaknya penghentian penuntutan	0	2	2	0	2	0
10	Rehabilitasi	0	1	1	0	1	0
11	Lain-lain	39	34	73	2	28	43
Jumlah		147	1843	1990	110	1733	147

Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Agama

Gambaran Umum

Tabel penanganan perkara di lingkungan peradilan agama tahun 2025

No	Klasifikasi Perkara	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Cabut	Sisa
1	Perdata Gugatan	27.726	531.584	559.310	480.654	53.037	25.619
2	Perdata Permohonan	2.213	133.541	135.754	124.527	9.389	1.838
3	Gugatan Sederhana	10	488	498	348	135	15
4	Jinayah	30	556	586	544	0	42
5	Praperadilan Jinayah	0	3	3	3	0	0
6	Jinayah Anak	3	34	37	36	0	1
Jumlah		29.982	666.206	696.188	606.112	62.561	27.515

Perkara Perdata Agama

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Gugatan Perdata Agama pada Pengadilan Agama Tahun 2025

Jenis Perkara	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Cabut 2025	Sisa 2025	% Penyele- saian
Perdata Gugatan	27.726	531.584	559.310	480.654	53.037	25.619	95,42%
Perdata Permohonan	2.213	133.541	135.754	124.527	9.389	1.838	98,65%
Gugatan Sederhana	10	488	498	348	135	15	96,99%
Jumlah	29.949	665.613	695.562	605.529	62.561	27.472	96,05%

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Gugatan Perdata Agama pada Pengadilan Agama Tahun 2025

No	Klasifikasi Perkara	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Cabut	Sisa
1	Cerai Gugat	19.241	401.948	421.189	366.071	37.472	17.646
2	Cerai Talak	6.844	115.649	122.493	103.937	12.294	6.262
3	Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah	144	4.562	4.706	3.764	729	213
4	Kewarisan	546	2.463	3.009	1.597	881	531
5	Harta Bersama	491	2.036	2.527	1.532	575	420
6	Penguasaan Anak	105	1.792	1.897	1.396	362	139
7	Izin Poligami	62	720	782	577	151	54
8	Pembatalan Perkawinan	27	339	366	227	104	35
9	Ekonomi Syariah	73	284	357	182	82	93
10	Hibah	25	121	146	68	38	40
11	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	11	118	129	98	17	14
12	Wakaf	6	45	51	35	6	10
13	Hak - hak bekas istri/kewajiban bekas Suami	4	42	46	25	10	11
14	Pengesahan Anak	2	38	40	29	11	0
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	1	33	34	25	8	1
16	Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan	1	31	32	23	7	2
17	Wasiat	1	21	22	13	1	8
18	Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu	1	11	12	10	1	1
19	Perwalian	0	8	8	5	2	1
20	Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri	3	8	11	10	1	0
21	Asal Usul Anak	0	4	4	3	1	0
22	Gugatan Memperoleh Akta Perdamaian Atas Kesepakatan Perdamaian di Luar Pengadilan	0	1	1	1	0	0
23	Lain-Lain	138	1.310	1.448	1.026	284	138
	Cerai Gugat	27.726	531.584	559.310	480.654	53.037	25.619

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Permohonan Perdata Agama pada Pengadilan Agama Tahun 2025

No	Klasifikasi Perkara	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Cabut	Sisa
1	Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah	1.035	56.162	57.197	53.646	2.962	589
2	Dispensasi Kawin	304	28.034	28.338	27.046	1.100	192
3	P3HP/Penetapan Ahli Waris	388	17.114	17.502	14.114	2.908	480
4	Lain-Lain	94	12.175	12.269	11.304	733	232
5	Perwalian	184	9.828	10.012	9.045	801	166
6	Asal Usul Anak	135	8.580	8.715	8.045	533	137

No	Klasifikasi Perkara	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Cabut	Sisa
7	Wali Adhol	72	1.617	1.689	1.311	338	40
8	Penolakan Perkawinan oleh PPN	1	9	10	5	4	1
9	Izin Kawin	0	8	8	4	4	0
10	Pencegahan Perkawinan	0	5	5	2	3	0
11	Penguasaan Anak	0	5	5	3	2	0
12	Pengesahan Anak	0	4	4	2	1	1
	Jumlah	2.213	133.541	135.754	124.527	9.389	1.838

Perkara Jinayah pada Mahkamah Syar'iyah

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Jinayah pada Mahkamah Syar'iyah Tahun 2025

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Sisa 2025
1	Maisir	20	236	256	254	2
2	Pemeriksaan	10	175	185	164	21
3	Pelecehan Seksual	0	65	65	59	6
4	Zina	0	35	35	33	2
5	Ikhtilath	0	20	20	16	4
6	Khamar	0	12	12	11	1
7	Liwath	0	4	4	4	0
8	Khalwat	0	3	3	3	0
9	Jinayat/Lain-lain	0	6	6	0	6
	Jumlah	30	556	586	544	42

Praperadilan Perkara Jinayah dan Perkara Jinayah Anak

Mahkamah Syar'iyah menerima permohonan praperadilan perkara Jinayah sebanyak 3 perkara dengan objek permohonan berkaitan dengan pengujian sah atau tidaknya penahanan dan sah atau tidak penetapan tersangka. Perkara tersebut telah diputus dan diselesaikan.

Mahkamah Syar'iyah menangani perkara jinayah anak sepanjang tahun 2025 sebanyak 34 perkara. Seluruh perkara tersebut telah diputus dan diselesaikan.

Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Militer

Pengadilan Militer

Tabel kinerja penanganan perkara pada Pengadilan Militer tahun 2025

No	Jenis Perkara	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Kembali	Sisa 2025
1	Dilmil (Kejahatan)	181	2.045	2.226	2.034	0	192
2	Dilmil (Pelanggaran)	0	246	246	246	0	0
3	Dilmilti Sebagai Pengadilan Tk 1	10	57	67	48	1	18
	Jumlah	191	2.348	2.539	2.328	1	210

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana Militer (Kejahatan) pada Pengadilan Militer di Seluruh Indonesia Tahun 2025

NO	KLASIFIKASI PERKARA	SISA 2024	MASUK 2025	BEBAN PERKARA	PUTUS 2025	KEMBALI	SISA 2025
1	Desersi	69	955	1.024	962	0	62
2	THTI	3	175	178	162	0	16
3	Penipuan	18	117	135	122	0	13
4	Kesusilaan	9	99	108	98	0	10
5	Narkotika	10	99	109	93	0	16
6	Penganiayaan	4	86	90	77	0	13
7	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	11	78	89	81	0	8
8	Perzinahan	6	63	69	56	0	13
9	Ketidaktaatan Militer terhadap perintah dinas	1	48	49	48	0	1
10	Pencurian	5	45	50	45	0	5
11	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2	34	36	36	0	0
12	Senjata Api / Senjata Tajam	0	23	23	22	0	1
13	Kejahatan terhadap asal usul dan perkawinan	2	21	23	20	0	3
14	Penggelapan	1	20	21	19	0	2
15	Pemalsuan surat	5	17	22	20	0	2
16	Perlindungan Anak	4	16	20	18	0	2
17	Insubordinasi	1	15	16	14	0	2
18	Pembunuhan	1	14	15	14	0	1
19	Penganiayaan Terhadap Bawahan	3	10	13	10	0	3
20	Penyalahgunaan Kekuasaan	1	10	11	9	0	2
21	Penadahan Militer	0	7	7	6	0	1
22	Perjudian	0	7	7	5	0	2
23	Pencabulan	3	5	8	8	0	0
24	Perkosaan	1	5	6	5	0	1
25	Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	0	4	4	2	0	2
26	Kekerasan terhadap orang/barang	0	4	4	4	0	0
27	Meninggalkan Pos penjagaan	2	4	6	5	0	1
28	Minyak dan Gas Bumi / Illegal Drilling dan Illegal Tapping	1	4	5	5	0	0
29	Penadahan, Pencetakan dan Penerbitan	0	4	4	4	0	0
30	Kehutanan / Illegal Logging	2	3	5	5	0	0
31	Menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan	0	3	3	2	0	1
32	Merampas Kemerdekaan	0	3	3	2	0	1
33	Pemalsuan mata uang dan uang kertas	1	3	4	4	0	0
34	Pengerusakan/Pembinaan/Penghilangan/ menjual barang-barang angkatan perang	0	3	3	2	0	1
35	Pornografi	1	3	4	4	0	0

NO	KLASIFIKASI PERKARA	SISA 2024	MASUK 2025	BEBAN PERKARA	PUTUS 2025	KEMBALI	SISA 2025
36	Imigrasi	0	2	2	2	0	0
37	Masuk rumah / pekarangan orang tanpa izin	0	2	2	2	0	0
38	Pemerasan dan Pengancaman	0	2	2	2	0	0
39	Penangkapan, Pengangkutan dan Perdagangan Satwa Liar	0	2	2	2	0	0
40	Pencurian Militer	0	2	2	2	0	0
41	Jaminan Fidusia	0	1	1	1	0	0
42	Kejahatan Jabatan	0	1	1	1	0	0
43	Kejahatan terhadap ketertiban umum	0	1	1	0	0	1
44	Kejahatan terhadap Penguasa Umum	0	1	1	1	0	0
45	Kejahatan yang membahayakan Keamanan Umum bagi orang/barang	1	1	2	2	0	0
46	Kepabeanan	1	1	2	2	0	0
47	Korupsi	10	1	11	10	0	1
48	Mengizinkan Bawahan Melakukan Kejahatan	0	1	1	1	0	0
49	Pemaksaan	0	1	1	1	0	0
50	Penculikan	0	1	1	1	0	0
51	Pengguguran Kandungan (Aborsi)	0	1	1	1	0	0
52	Penghancuran / perusakan barang	1	1	2	2	0	0
53	Penghasutan Militer untuk melakukan kejahatan	0	1	1	1	0	0
54	Penghinaan Terhadap Atasan	0	1	1	1	0	0
55	Pengulangan (Residive) Pencurian/Penadahan Militer	0	1	1	1	0	0
56	Penyalahgunaan pengaruh terhadap bawahan	0	1	1	1	0	0
57	Perikanan / Illegal Fishing	0	1	1	1	0	0
58	Sangkaan/Aduan/Laporan Palsu Terhadap Atasan	0	1	1	1	0	0
59	Tenaga Kesehatan (Malapraktik)	0	1	1	1	0	0
60	Menantang Atasan Untuk Berkelahi / Duel	1	0	1	1	0	0
61	Lain-lain	0	9	9	7	0	2
JUMLAH		181	2.045	2.226	2.037	0	189

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana Militer (Pelanggaran) pada Pengadilan Militer di Seluruh Indonesia Tahun 2025

Klasifikasi Perkara	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Kembali	Sisa Akhir
Pelanggaran Lalu Lintas	0	246	246	246	0	0

Pengadilan Militer Tinggi (sebagai peradilan tingkat pertama)

Tabel Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Militer Tinggi Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Dikem Balikan	Sisa Akhir 2025
1	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	0	10	10	6	0	4
2	Desersi	0	8	8	6	0	2
3	Penipuan	3	7	10	7	0	3
4	Penyalahgunaan Kekuasaan	1	6	7	6	1	0
5	Kesusilaan	2	4	6	4	0	2
6	Ketidaktaatan Militer terhadap perintah dinas	0	3	3	3	0	0
7	Korupsi	4	3	7	4	0	3
8	Perzinahan	0	2	2	1	0	1
9	Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	0	1	1	1	0	0
10	Jaminan Fidusia	0	1	1	1	0	0
11	Kejahatan terhadap asal usul dan perkawinan	0	1	1	1	0	0
12	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	0	1	1	1	0	0
13	Masuk rumah / pekarangan orang tanpa izin	0	1	1	1	0	0
14	Merampas Kemerdekaan	0	1	1	0	0	1
15	Narkotika	0	1	1	1	0	0
16	Pemalsuan surat	0	1	1	1	0	0
17	Penganiayaan	0	1	1	1	0	0
18	Penganiayaan Terhadap Bawahan	0	1	1	1	0	0
19	Pengerusakan/Pembinasaan/ Penghilangan/ Menjual barang-barang angkatan perang	0	1	1	1	0	0
20	Perdagangan Orang (Human Trafficking)	0	1	1	0	0	1
21	THTI	0	1	1	1	0	0
22	Lain-lain	0	1	1	0	0	1
	Jumlah	10	57	67	48	1	18

Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara di Seluruh Indonesia Tahun 2025

No	Klasifikasi	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Cabut	Sisa 2025
1	Pertanahan	301	966	1267	728	248	291
2	Kepegawaian	45	221	266	161	44	61
3	Tindakan Administratif Pemerintah	68	155	223	131	50	42
4	Kepala & Perangkat Desa	22	108	130	93	17	20
5	Perijinan	38	95	133	83	29	21

No	Klasifikasi	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Cabut	Sisa 2025
6	Badan Hukum / Parpol	26	64	90	55	16	19
7	KIP	9	60	69	59	0	10
8	Tender/ Pengadaan Barang dan Jasa	7	30	37	22	7	8
9	Lingkungan Hidup	2	7	9	5	0	4
10	PAW	2	5	7	4	0	3
11	Ketenagakerjaan	0	5	5	4	0	1
12	Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	1	2	3	1	0	2
13	Proses Pemilu	0	1	1	1	0	0
14	Fiktif Positif	0	1	1	1	0	
15	Penyalahgunaan Wewenang	0	1	1	0	1	0
16	Kepala Daerah	0	0	0	0	0	
17	Lain-lain	133	438	571	305	127	139
	Jumlah	654	2.159	2.813	1.653	539	621

Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan Tingkat Pertama

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Gugatan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2025

No	Klasifikasi Perkara	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Dicabut	Sisa Akhir 2025
1	Kepegawaian	14	59	73	48	0	25
2	Pilkada	0	3	3	3	0	0
2	Lain-lain	4	48	52	39	0	13
	Jumlah	18	18	110	128	90	0

PENYELESAIAN PERKARA MELALUI MEDIASI, DIVERSI, DAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF

Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Mediasi

Tabel Data Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Tahun 2025

No	Pengadilan	Jumlah Perkara Mediasi	Status Keberhasilan Mediasi			
			Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan	Dalam Proses
1	Pengadilan Negeri	26.507	2.543	21.668	696	1.600
			5,76%	49,04%	1,58%	3,62%
2	Pengadilan Agama	61.858	36.977	22.461	1.593	827
			59,78%	36,31%	2,58%	1,34%
	Jumlah	88.365	39.520	44.129	2.289	2.427
	Persentase		44,72%	49,94%	2,59%	2,75%

Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Diversi

Tabel Data Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Diversi pada Pengadilan Negeri

Periode	Jumlah Perkara Pidana Anak	Jumlah Perkara Diversi	%	Status Keberhasilan					
				Berhasil	%	tidak berhasil	%	Dalam Proses	%
2024	4960	996	20,08%	424	42,57%	173	17,37%	399	40,06%
2025	5049	829	16,42%	645	77,80%	140	16,89%	44	5,31%

Penyelesaian Perkara Pidana dengan Pendekatan Keadilan Restoratif

Penerapan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif sepanjang tahun 2025 adalah sebagaimana grafik berikut ini. [Belum ada data atau tabel]

KINERJA PENANGANAN PERKARA MELALUI LAYANAN PENGADILAN ELEKTRONIK

Perkara kasasi dan peninjauan kembali elektronik yang diterima Mahkamah Agung sepanjang tahun 2025 sebanyak 29.379 perkara, atau 77,48% dari total perkara yang diterima sebanyak 37.918 perkara.

Penanganan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama Secara Elektronik

Tabel Perkembangan Perkara e-Court Periode 2021-2024

No.	Badan Peradilan	2021	2022	2023	2024	2025	% kenaikan
1	Pengadilan Negeri	90.045	102.783	118.911	127.660	141.564	10,89%
2	Pengadilan Agama	133.339	177.793	181.258	280.805	642.553	128,83%
3	Pengadilan Tata Usaha Negara	2.299	2.765	2.562	2.287	2.267	-0,87%
Jumlah		225.683	283.341	302.731	410.752	786.384	91,45%

Data perkara yang diselesaikan dengan persidangan elektronik pada setiap lingkungan peradilan adalah sebagaimana tabel berikut.

No	Lingkungan Peradilan	Ecourt	Pengguna Layanan	Pengguna Terdaftar		Pengguna Lain	
				Jumlah	%	Jumlah	%
1	Peradilan Umum	141.564	87.161	19.494	22,37%	67.667	77,63%
2	Peradilan Agama	642.553	412.960	19.719	4,78%	393.241	95,22%
3	Peradilan TUN	2.267	1.527	1.340	87,75%	187	12,25%
Total		784.117	500.121	39.213	7,84%	460.908	92,16%

Rerata waktu memutus perkara yang ditangani oleh pengadilan melalui persidangan elektronik pada setiap lingkungan peradilan tergambar dalam tabel berikut.

No	Lingkungan Peradilan	Jumlah Perkara e-litigasi	Pengguna Terdaftar	Rerata Waktu Putus	Pengguna Lainnya	Rerata Waktu Putus
1	Pengadilan Negeri	141.564	19.494	69,84	67.667	23,89
2	Pengadilan Agama	642.553	19.719	34,46	393.241	33,05
3	Pengadilan TUN	2.267	1.340	85,58	187	74,93

Penanganan Perkara Perdata, Perdata Agama dan TUN pada Pengadilan Tingkat Banding

Perincian keadaan perkara e-Court pada pengadilan tingkat banding tergambar pada tabel berikut.

No	Lingkungan Peradilan	Sisa Tahun Lalu	Jumlah Ecourt Banding Terdaftar	Jumlah Ecourt Banding Putus	Jumlah Sisa Perkara Ecourt Banding
1	Peradilan Umum	470	9037	8966	970
2	Peradilan AGAMA	13	3021	3008	239
3	Peradilan TUN	113	940	938	160
Total		483	12.058	11.974	1.209

Pengguna Layanan e-Court

No	Jenis Pengguna	sampai 2024	2025	Jumlah
1	Pengguna Terdaftar	60.919	8.894	69.813
2	Pengguna lainnya	397.789	490.859	888.648
Jumlah		458.708	499.753	958.461

AKSEPTABILITAS PUTUSAN PENGADILAN

Tabel Tingkat Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2025

Keadaan Perkara per Tingkat Pengadilan	Umum		Agama		Militer	TUN	Jumlah
	Perdata	Pidana	Perdata Agama	Jinayah			
Jumlah Perkara diputus Pengadilan Tingkat Pertama	44.920	130.298	480.654	544	2.085	1.653	660.154
Jumlah Perkara Banding	12.280	20.653	3.379	55	407	940	37.714
Rasio Upaya Hukum Banding	27,34%	15,85%	0,70%	10,11%	19,52%	56,87%	5,71%
Tingkat Akseptabilitas Putusan Tingkat Pertama	72,66%	84,15%	99,30%	89,89%	80,48%	43,13%	94,29%

Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Banding

Tabel Tingkat Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Banding

Keadaan Perkara per Tingkat Pengadilan	Umum			Agama		Militer	TUN	Jumlah
	Perdata Khusus	Perdata	Pidana	Perdata Agama	Jinayah			
Jumlah Perkara yang diputus pada Pengadilan Banding/ Pengadilan Khusus	2.909	11.220	20.588	3.340	55	382	937	39431
Jumlah permohonan kasasi	1398	6395	14595	1004	31	281	814	24518
Rasio Upaya Hukum Kasasi	48,06%	57,00%	70,89%	30,06%	56,36%	73,56%	86,87%	62,18%
Tingkat Akseptabilitas Putusan Pengadilan Khusus dan Banding	51,94%	43,00%	29,11%	69,94%	43,64%	26,44%	13,13%	37,82%

Akseptabilitas Putusan Kasasi Mahkamah Agung

Tabel Tingkat Akseptabilitas Putusan Kasasi Mahkamah Agung Tahun 2025

Keadaan Perkara per Tingkat Pengadilan	Perdata Khusus	Perdata	Pidana	Pidana Khusus	Agama	Militer	TUN	Jumlah
Jumlah perkara yang diputus pada tingkat kasasi	1405	6299	2210	12386	1035	281	899	24515
Jumlah putusan kasasi yang diajukan permohonan upaya hukum peninjauan kembali	28	1312	107	609	102	33	174	2365
Rasio Upaya Hukum Peninjauan Kembali	1,99%	20,83%	4,84%	4,92%	9,86%	11,74%	19,35%	9,65%
Tingkat Akseptabilitas Putusan Kasasi	98,01%	79,17%	95,16%	95,08%	90,14%	88,26%	80,65%	90,35%

Perkara yang diajukan Peninjauan Kembali

Tabel Data Putusan Berkekuatan Hukum Tetap yang Diajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Tahun 2025

No	Jenis Permohonan	Jml	Putusan BHT Yang Diajukan PK			
			PK	KASASI	BANDING	PERTAMA
1	Pidana	254	7	107	33	107
2	Pidana Khusus	3.474	39	609	377	2.449
3	Perdata	1.550	32	1.312	119	87
4	Perdata Khusus	52	4	28	0	20
5	Perdata Agama	171	4	102	19	46
6	Jinayah	2	2	0	0	0
7	Pidana Militer	35	0	33	0	2
8	Tata Usaha Negara	228	15	174	27	12
	Jumlah	5.766	103	2365	575	2.723
	Persentase		1,79%	41,02%	9,97%	47,23%
	Pajak	7.500	45	0	7.455	0
	Jumlah	13.266	148	2.365	8.030	2723

PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN

Jumlah putusan yang belum dieksekusi hingga akhir 2025 berkurang 17,38% dari tahun 2024 yang berjumlah 5.344 perkara menjadi 4.415 perkara.

Tabel kinerja pelaksanaan eksekusi putusan di lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan TUN.

No	Lingkungan Peradilan	Sisa Perkara Belum Eksekusi	Permo- honan Eksekusi	Beban Eksekusi	Pelak- sanaan Eksekusi	Sisa Perkara Belum Eksekusi	Kinerja
1	Peradilan Umum	3.797	2.870	6.667	2.979	3.688	44,68%
2	Peradilan Agama	333	460	793	357	436	45,02%
3	Peradilan TUN	153	233	386	95	291	24,61%
	Jumlah	4.283	3.563	7.846	3.431	4.415	43,73%

PENANGANAN PERKARA PERDATA LINTAS NEGARA

No	Pengadilan	Jumlah Pengadilan	Jenis Dokumen		Jumlah PgL/Pbt	Jml Negara
			Panggilan	Pemberi-tahuan		
1	Pengadilan Negeri	53	409	286	695	46
2	Pengadilan Agama	60	119	69	188	41
	Jumlah	113	528	355	883	

Daftar negara tujuan penyampaian dokumen panggilan/pemberitahuan adalah sebagai berikut.

No	Negara	Peradilan Agama			Peradilan Umum			Total Jumlah
		PGL	PBT	SUB JML	PGL	PBT	SUB JML	
1	Singapore	7	5	12	77	84	161	173
2	United States Of America	18	8	26	49	27	76	102
3	Malaysia	24	11	35	31	13	44	79
4	Australia	7	5	12	22	20	42	54
5	Japan	10	2	12	14	23	37	49
6	Netherlands, The	6	5	11	22	14	36	47
7	China	1	0	1	26	18	44	45
8	Hong Kong	1	0	1	16	12	28	29
9	United Kingdom	3	4	7	14	5	19	26
10	Luxembourg	0	0	0	10	12	22	22
11	Cayman Islands	0	0	0	6	12	18	18
12	Germany	4	3	7	9	2	11	18
13	Taiwan	3	3	6	8	3	11	17
14	United Arab Emirates	4	2	6	10	1	11	17

No	Negara	Peradilan Agama			Peradilan Umum			Total Jumlah
		PGL	PBT	SUB JML	PGL	PBT	SUB JML	
15	Virgin Islands (British)	0	0	0	10	7	17	17
16	Philippines, The	1	1	2	6	8	14	16
17	India	0	1	1	12	2	14	15
18	Canada	0	1	1	8	2	10	11
19	Saudi Arabia	6	3	9	0	2	2	11
20	South Korea	1	0	1	5	4	9	10
21	France	2	1	3	5	1	6	9
22	Vietnam	1	0	1	7	1	8	9
23	Thailand	2	1	3	4	1	5	8
24	Denmark	0	0	0	5	0	5	5
25	Korea, The D.P.R Of (North K.)	0	2	2	2	1	3	5
26	Russian Federation, The	0	0	0	5	0	5	5
27	Kuwait	2	1	3	1	0	1	4
28	Switzerland	0	0	0	3	1	4	4
29	Ukraine	0	0	0	0	4	4	4
30	Cyprus	0	1	1	2	0	2	3
31	Egypt	2	1	3	0	0	0	3
32	Italy	1	0	1	2	0	2	3
33	Lebanon	0	0	0	3	0	3	3
34	Monaco	0	0	0	0	3	3	3
35	Seychelles	0	0	0	3	0	3	3
36	Turkey	2	1	3	0	0	0	3
37	Austria	1	1	2	0	0	0	2
38	Greece	0	0	0	2	0	2	2
39	Hungary	1	0	1	0	1	1	2
40	Ireland	1	0	1	1	0	1	2
41	Liberia	0	0	0	2	0	2	2
42	Morocco	1	1	2	0	0	0	2
43	New Zealand	0	0	0	1	1	2	2
44	Sweden	1	1	2	0	0	0	2
45	Algeria	0	1	1	0	0	0	1
46	Bangladesh	0	0	0	1	0	1	1
47	Belgium	0	0	0	1	0	1	1
48	Brunei	1	0	1	0	0	0	1
49	Dominica	1	0	1	0	0	0	1
50	East Timor	0	0	0	1	0	1	1
51	Iran	0	0	0	1	0	1	1
52	Liechtenstein	0	0	0	0	1	1	1

No	Negara	Peradilan Agama			Peradilan Umum			Total Jumlah
		PGL	PBT	SUB JML	PGL	PBT	SUB JML	
53	Macedonia, Republic Of	1	0	1	0	0	0	1
54	Norway	1	0	1	0	0	0	1
55	Pakistan	0	1	1	0	0	0	1
56	Panama	0	0	0	1	0	1	1
57	Portugal	1	0	1	0	0	0	1
58	Puerto Rico	1	0	1	0	0	0	1
59	Serbia, Republic Of	0	1	1	0	0	0	1
60	Spain	0	0	0	1	0	1	1
61	Uzbekistan	0	1	1	0	0	0	1
	Jumlah	119	69	188	409	286	695	883

RASIO BEBAN DAN KINERJA PENANGANAN PERKARA

Tabel Rasio Beban Penanganan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2025

No.	Rasio Beban Kerja	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Militer	Peradilan TUN	Pengadilan Pajak	Jumlah
1	Jumlah Beban Perkara Tk Pertama	2.220.959	696.188	2.539	2.941		2.922.627
	Jumlah Hakim	4037	2463	148	384		7032
	Rasio Hakim dengan Jumlah Perkara	1:550	1:283	1:17	1:8		1:416
	Rata-Rata Beban Tiap Hakim	1650	848	51	23		1247
2	Jumlah Beban Perkara Tk Banding	36029	3457	450	1049	23392	64377
	Jumlah Hakim	664	399	31	62	70	1226
	Rasio Hakim dengan Jumlah Perkara	1:54	1:9	1:15	1:17	1:334	53
	Rata-Rata Beban Tiap Hakim	163	26	44	51	1003	158

Tabel Rasio Beban Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI Tahun 2025

Jumlah	Pidana	Perdata	Agama	Militer	TUN	Jumlah
Jumlah Beban Perkara	18.396	9.485	1.208	318	8.741	38.148
Jumlah Hakim Agung	15	15	5	4	9	48
Rasio Hakim Agung dengan Beban Perkara	1:1.226	1:632	1:242	1:80	1:971	1:795
Rerata Beban Kerja Setiap Hakim	3.679	1.897	725	239	2.914	2.384

Rasio Kinerja Penanganan Perkara dengan Jumlah Hakim

Tabel Rasio Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2025

No	Produktivitas	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Militer	Peradilan TUN	Pengadilan Pajak	Jumlah
1.	Perkara diputus Pengadilan Tk Pertama	2.168.669	606.112	2.331	1.743		2.778.855
	Jumlah Hakim	4037	2463	148	384		7032
	Rasio	1:537	1:246	1:16	1:5		1:395
	Rata-Rata Produktivitas Tiap Hakim	1612	738	47	14		1186
2.	Perkara Putus Pengadilan Tk Banding	31.808	3.395	382	937	15.333	51.855
	Hakim	664	399	31	62	70	1226
	Rasio	1:48	1:9	1:12	1:15	1:219	1:42
	Rata-Rata Produktivitas Tiap Hakim	144	26	37	45	657	127

Tabel Rasio Kinerja Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI Tahun 2025

Jumlah	Pidana	Perdata	Agama	Militer	TUN	Jumlah
Jumlah Perkara Putus	18.396	9.339	1.208	318	8.712	37.973
Jumlah Hakim Agung	15	15	5	4	9	48
Rasio Hakim Agung dengan Perkara	1:1.226	1:623	1:242	1:80	1:968	1:791
Rerata produktivitas Tiap Hakim	3.679	1.868	725	239	2.904	2.373

KONTRIBUSI KEUANGAN PERKARA TERHADAP KEUANGAN NEGARA

Kontribusi dari PNBP

No	Akun		Realisasi (Rp)
1.	425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	130.740.000
2.	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	3.020.180.000
3.	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	26.561.415.000
4.	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	57.360.997.242
Jumlah			87.073.332.242

Putusan Peninjauan Kembali Perkara Pajak

Mahkamah Agung melalui putusan peninjauan kembali perkara pajak telah menetapkan pajak yang harus dibayarkan kepada negara senilai Rp20.891.807.732.972,00 (dua puluh triliun delapan ratus sembilan puluh satu miliar delapan ratus tujuh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) dan USD 107.434.098,67 (seratus tujuh juta empat ratus tiga puluh empat ribu sembilan puluh delapan dolar Amerika enam puluh tujuh sen).

Putusan Perkara Pidana, Pidana Khusus, Pidana Militer

No	Jenis	Jumlah (Rp)
1	Uang Denda	56.674.641.200.942
2	Uang Pengganti	9.027.617.922.872
	Jumlah	65.702.259.123.814

Pengelolaan Keuangan Perkara pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya

Biaya Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung

No	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	Saldo Awal Tahun 2025	29.237.240.702	
2	Penerimaan Tahun 2025	25.845.610.829	
3.	Penggunaan Biaya Proses 2025		22.812.456.024
4.	Saldo Akhir 2025		32.270.395.507
	Jumlah	55.082.851.531	55.082.851.531

Biaya Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Banding

No	Jenis Perkara	Jumlah perkara	Biaya Proses	Jumlah (Rp)
1	Peradilan Umum (Perdata)	12280	150.000	1.842.000.000
2	Peradilan Agama (Perdata)	3379	150.000	506.850.000
3	Peradilan Tata Usaha Negara	940	250.000	235.000.000
	Jumlah			2.583.850.000



Bab 2

Reformasi Birokrasi dan Akses Terhadap Keadilan

PROGRAM PEMBARUAN

Penyederhanaan Struktur Organisasi

Selama tahun 2025 Mahkamah Agung melakukan analisis organisasi dalam rangka penyederhanaan struktur organisasi. Inisiasi ini muncul pada saat pembahasan organisasi dan tata kerja Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 5141/SEK/SK.OT1.1/V/2025.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Pelaksanaan SPIP di Mahkamah Agung sudah berjalan dengan baik, hal ini terbukti dengan hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Mahkamah Agung Tahun 2025 ini berada pada level “terdefinisi” atau tingkat 3 (tiga) dari 5 (lima) tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP.

Pembangunan Zona Integritas

Pada tahun 2025, 19 unit kerja berhasil meraih predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), sehingga sampai dengan tahun 2025, sebanyak 278 unit kerja telah berhasil meraih predikat WBK, dan 16 diantaranya juga sudah berhasil meraih predikat WBBM.

Opini BPK dan Pengelolaan Keuangan

Mahkamah Agung menerima Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-13 kali, secara berturut-turut.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Saat ini predikat SAKIP Mahkamah Agung adalah “BB”, menunjukkan implementasi akuntabilitas kinerja sangat baik pada instansi pusat dan sebagian unit kerja, ditandai dengan terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Pengembangan Organisasi

Restrukturisasi Organisasi

Selain unit kerja dengan tugas fungsi teknologi informasi, hasil evaluasi organisasi di Mahkamah Agung mengidentifikasi adanya kebutuhan akan pembentukan beberapa unit kerja baru lainnya, yaitu:

- Unit Penilaian Kompetensi/*Assessment Center*
- Unit yang membidangi kerja sama luar negeri

Pengalihan Pengadilan Pajak ke Bawah Mahkamah Agung

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 26/PUU-XXI/2023 mengamanatkan penyatuan atap Pengadilan Pajak di bawah Mahkamah Agung, mencakup pembinaan teknis peradilan dan pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan. Pengalihan ini akan memberikan dampak positif dalam menjaga independensi lembaga peradilan, menghilangkan intervensi instansi lain dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan lembaga peradilan, serta meningkatkan kepatuhan pajak dan penerimaan negara di bidang pajak.

Keterbukaan Informasi Publik

Pada tahun 2025, Mahkamah Agung kembali menerima predikat informatif kategori lembaga negara dan lembaga pemerintah non-kementerian, dengan perolehan nilai 97,43 meningkat dari tahun sebelumnya dengan nilai 96,09.

AKSES TERHADAP KEADILAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

Mediasi

Sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2025 Mahkamah Agung telah memberikan akreditasi kepada 33 lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan mediasi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas mediator nonhakim bersertifikat yang berperan sebagai mediator di pengadilan. Selain itu, Mahkamah Agung juga mendukung Program *Peacemaker Justice Award* yang diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan didukung oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Pembentukan Pengadilan

Pada tahun 2025 telah dibentuk dua Pengadilan Militer Tinggi dan tiga Pengadilan Militer melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pengadilan Militer Tinggi IV Balikpapan dan Pengadilan Militer Tinggi V Makassar, dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pengadilan Militer I-03 Pekanbaru, Pengadilan Militer V-18 Kendari, dan Pengadilan Militer V-21 Manokwari.

Inovasi Pelayanan Publik

Aplikasi yang berhasil dibuat pada tahun 2025, antara lain, adalah sebagai berikut.

1. SIMETRI (Sistem Manajemen Elektronik Terintegrasi).
2. SMART TPM.
3. RTV (Ruang Tamu Virtual).
4. BLC (Badilum Learning Center).
5. E-BIMANTARA (Elektronik Biaya Mutasi Terintegrasi).
6. E-Examinasi.
7. PATUH (Persidangan Tepat Waktu dan Humanis).
8. EMPHATI (Elektronik Monitoring Penanganan Keluhan Saran & Kritik).
9. Elektronik Putusan (e-Putusan) dan Elektronik Akta Cerai (e-AC).
10. Aplikasi SIMPAN Terintegrasi.
11. Aplikasi APS Badilmiltun (aplikasi pendukung Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)).

Layanan Peradilan bagi Masyarakat Tidak Mampu

Layanan Pembebasan Biaya Perkara

Tabel Data Layanan Pembebasan Biaya Perkara di Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara pada Tahun 2025

No.	Lingkungan Peradilan	Jumlah Perkara yang Diselesaikan	
		2024	2025
1.	Peradilan Umum	1.229	959
2.	Peradilan Agama	26.867	21.729
3.	Peradilan Tata Usaha Negara	22	18
Total		28.118	22.706

Sidang di Luar Gedung Pengadilan

Tabel Data Layanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara pada Tahun 2025

No.	Lingkungan Peradilan	Jumlah Perkara yang Diselesaikan	
		2024	2025
1.	Peradilan Umum	6.710	4.606
2.	Peradilan Agama*	39.027	33.384
3.	Peradilan Militer	463	428
4.	Peradilan Tata Usaha Negara	18	42
	Total	46.218	38.460

Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Tabel Data Layanan Posbakum di Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara pada Tahun 2025

No.	Lingkungan Peradilan	Jumlah Orang Penerima Layanan	
		2024	2025
1.	Peradilan Umum	79.385	62.174
2.	Peradilan Agama	235.522	236.540
3.	Peradilan Tata Usaha Negara	3.372	3.946
	Total	318.279	302.660

Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP)

Sampai dengan saat ini, terdapat total 101 Pengadilan Negeri dan 126 Pengadilan Agama yang menyediakan layanannya pada Mal Pelayanan Publik setempat. Total pengguna layanan perwakilan pengadilan di MPP selama tahun 2025 adalah sebanyak 13.795 orang.

Kemudahan Akses bagi Penyandang Disabilitas

Jumlah pengadilan yang menerima Anggaran Sarana Prasarana Layanan bagi Penyandang Disabilitas sampai dengan tahun 2025 adalah 474 pengadilan.

Data Pelayanan Informasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Jumlah data pengguna layanan meja informasi di Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya selama tahun 2025 adalah sebagai berikut.

No.	Informasi	Jumlah Layanan	
		2024	2025
1.	Layanan informasi Badilum	164.046	181.252
2.	Layanan informasi Badilag	285.654	512.851
3.	Layanan informasi Badilmiltun (Peradilan Militer)	258	216
4.	Layanan informasi Badilmiltun (Peradilan TUN)	2.190	2.174
	Total	452.148	696.493



Bab 3

Manajemen Sumber Daya Manusia

REFORMASI DALAM KEBIJAKAN SDM

Manajemen SDM Mahkamah Agung menghadapi tantangan validitas dan integrasi data kepegawaian lintas satuan kerja, terutama dalam menggabungkan data kuantitatif dengan konteks kualitatif untuk pengambilan keputusan yang adil dan humanis. Menjawab hal tersebut, MA memperkuat tata kelola karier berbasis merit melalui sistem penilaian kinerja terintegrasi, pemutakhiran dan verifikasi data berkala, serta pengembangan aplikasi kepegawaian sebagai fondasi kebijakan berbasis kinerja, kompetensi, dan integritas. Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Training Need Analysis diterapkan untuk memastikan kesesuaian formasi, kompetensi, dan kebutuhan organisasi, termasuk pemenuhan jabatan strategis dan fungsional di berbagai wilayah peradilan. Reformasi promosi dan mutasi menjadi instrumen kunci penguatan integritas dan kepercayaan publik, ditopang regulasi yang menegaskan transparansi, objektivitas, dan meritokrasi. Proses promosi kini berbasis data kinerja dan rekam jejak integritas, dilengkapi keterbukaan hasil TPM kepada publik serta integrasi informasi dari lembaga

pengawas internal dan eksternal. Pendekatan serupa diterapkan bagi pegawai non-hakim melalui pemetaan potensi, lelang terbuka JPT, dan sistem *reward and punishment* yang konsisten, termasuk inovasi digital di peradilan militer. Keseluruhan reformasi ini berdampak pada meningkatnya korelasi kinerja dengan promosi, menurunnya pelanggaran etik, dan menguatnya legitimasi Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan yang profesional, bersih, dan akuntabel.

PEMBINAAN INTEGRITAS DAN PENGAWASAN

Pembinaan integritas menjadi fondasi budaya kerja yang bersih dan akuntabel dengan menekankan pendekatan preventif serta menjadikan integritas sebagai nilai bersama, bukan sekadar penegakan disiplin. Mahkamah Agung memperkuat upaya ini melalui penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), kolaborasi antikorupsi dengan KPK, pengawasan digital berkelanjutan, serta kampanye “Peradilan Bersih Tanpa Gratifikasi” dan komunikasi internal rutin, sehingga integritas terinternalisasi dalam setiap keputusan dan pelayanan kepada masyarakat.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KAPASITAS SDM

Mahkamah Agung mengembangkan kompetensi SDM untuk menjawab tuntutan pelayanan publik prima, digitalisasi peradilan, dan kemajuan teknologi seperti AI dengan membangun SDM yang profesional, adaptif, dan berwawasan global. Strategi dilakukan melalui pemanfaatan platform digital SIPINTAR berbasis blended learning, Training Need Analysis (TNA), kolaborasi lintas institusi, serta program kepemimpinan dan peningkatan kemampuan bahasa Inggris, disertai penguatan SDM teknologi informasi sebagai penopang utama transformasi digital peradilan.

Tabel Komposisi SDM Bidang Teknologi Informasi

Kelompok Jabatan	Jabatan	2023	2024	2025
Jabatan Fungsional	Pranata Komputer Ahli Muda	33	36	53
	Pranata Komputer Ahli Pertama	552	553	533
	Pranata Komputer Pelaksana	12	11	6
	Pranata Komputer Mahir	4	5	5
	Pranata Komputer Terampil	3	7	8
Pelaksana	Analisis Data dan Informasi	3	3	3
	Klerek - Pengelola Sistem dan Teknologi Informasi	6	13	18
	Operator Komputer	1	1	0
	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	0	0	83
	Pengelola Sistem Dan Jaringan	2	2	0
	Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	1	0	0
Total		617	631	709

Mahkamah Agung memperkuat SDM teknologi informasi seiring meningkatnya kebutuhan digital peradilan, tercermin dari kenaikan jumlah pegawai TI sebesar 14,9% pada 2023–2025 dan dominasi jabatan fungsional Pranata Komputer dengan kompetensi yang semakin tinggi. Penguatan ini dilengkapi pengembangan kepemimpinan, perhatian pada kesejahteraan psikologis pegawai, serta manajemen SDM berbasis kompetensi melalui Unit Penilaian Kompetensi yang melakukan asesmen ASN secara sistematis dan kredibel, sehingga mendukung terwujudnya aparatur peradilan yang profesional, adaptif, dan berintegritas.

Tabel Kegiatan Pemetaan dan Penilaian Kompetensi

No	Kegiatan	Pemetaan Kompetensi	Penilaian Kompetensi
1	Jabatan Fungsional dan Pelaksana	15	
2	Pejabat Adm, Pengawas dan Pelaksana	65	
3	PejabAdm, Pengawas dan Pelaksana	73	
4	Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA dan IB	98	
5	Potensi pejabat adm	118	
6	Pejab Adm, Pengawas, Fungsional dan Pelaksana	98	
7	Potensi Pelaksana	1183	
8	Potensi Perpindahan Antar Instansi	68	
9	Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Madya		4

No	Kegiatan	Pemetaan Kompetensi	Penilaian Kompetensi
10	Petugas Meja Pengaduan Badan Pengawasan		20
11	Seleksi Panitera Muda		20
12	Seleksi Calon Pimpinan PN Kelas IA dan IB		41
13	Seleksi Calon Pimpinan PN Kelas IA dan IB - Mei 2025		16
14	Seleksi Calon Pimpinan Pengadilan Militer Tipe A		24
15	Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa		12
16	Seleksi Jabatan Panitera Muda Perkara Pidana Militer		7
17	Seleksi Calon Wakil Ketua Pengadilan Tinggi		31
18	Seleksi Jabatan Tinggi Pratama		41
19	Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional		44
20	Seleksi Calon Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah		24
21	Seleksi Calon Wakil ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IA		51
22	Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Sekretaris Daerah		5
23	Seleksi Calon Wakil Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IB dan Kelas II		71
24	Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional		28
	Total	1718	439
			2157

Mahkamah Agung memperkuat manajemen SDM berbasis sistem merit melalui Profiling ASN (Pro ASN) bekerja sama dengan BKN pada Desember 2025 yang diikuti 2.914 pegawai sebagai dasar penataan jabatan dan pengembangan karier. Upaya ini didukung pengembangan kompetensi berkelanjutan melalui pelatihan teknis peradilan dan manajemen kepemimpinan yang pada tahun 2025 menjangkau lebih dari 19 ribu pegawai, guna mewujudkan aparatur peradilan yang profesional dan berintegritas.

APRESIASI DAN PEMBERDAYAAN SDM UNGGUL

Mahkamah Agung mewujudkan apresiasi melalui promosi dan pengembangan karir. Mekanisme apresiasi diterapkan untuk memotivasi kinerja unggul. Penghargaan diberikan berdasarkan beberapa parameter yaitu kinerja, integritas, inovasi, dan kontribusi pelayanan publik.

Pada tahun 2025, 54 pegawai dan 12 satuan kerja menerima penghargaan “SDM Unggul Peradilan Umum”. Pada lingkungan peradilan agama, pemberian penghargaan satuan kerja berprestasi dilakukan berdasarkan 26 kategori penilaian triwulanan, yang mencakup diantaranya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), pelaksanaan mediasi, implementasi e-Court, dan pembangunan Zona Integritas.

PROGRAM ISU SPESIFIK DAN KELOMPOK APARATUR TERTENTU

Secara keseluruhan, total Hakim dan Aparatur yang menduduki jabatan pimpinan pengadilan dan pejabat struktural pada tahun 2025 tercatat sebanyak **4.254 pria** dan **2.160 wanita**. Jumlah pria menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun, sedangkan jumlah wanita cenderung stabil dan sedikit meningkat. Kondisi ini mencerminkan adanya pergeseran komposisi SDM yang lebih inklusif, dan diarahkan tidak hanya pada pemenuhan kebutuhan jabatan, tetapi juga pada peningkatan keseimbangan gender.

KOMPOSISI PEGAWAI

Pada akhir tahun 2025 jumlah SDM di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya berjumlah 44.532 orang yang tersebar pada fungsi yudisial dan non yudisial dengan komposisi hakim dan aparatur teknis peradilan sebesar 53.6% dan non teknis sebesar 46,4%.

Tabel Sebaran SDM Berdasarkan Kelompok Jabatan

No	Nama Kelompok Jabatan	Pusat	Umum		Agama		TUN		Militer		Total
			Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	
1	Hakim Agung	48									48
2	Hakim Ad Hoc	9	101	356							466
3	Hakim Tinggi	91	664		399		62		31		1247
4	Hakim	218	40	4037	6	2463	1	384		148	7297
5	Panitera		34	372	34	410	8	30	3	19	910
6	Panitera Muda		119	1125	69	986	16	56	7	17	2395
7	Panitera Pengganti		473	1994	785	1035	75	184	14	79	4639
8	Juru Sita			1391		1110	15	60			2576
9	Struktural	344	226	1386	224	1438	55	114	27	63	3533
10	Fungsional	692	252	543	265	644	14	17	31	77	2535
11	Pelaksana	312	628	3945	457	3253	83	240	70	268	9256
12	PPPK	643	419	3855	398	3464	43	148	60	256	9286
Total		2357	2956	19004	2637	14803	222	731	393	1429	44532

Tabel Sebaran SDM Berdasarkan Pendidikan

No	Jabatan	S-3	S-2	S-1	D-IV	D-III	D-II	D-I	SLTA	SLTP	SD	Total
1	Hakim Agung	30	18									48
2	Hakim Ad Hoc	57	278	130	1							466
3	Hakim Tinggi	197	900	150								1247
4	Hakim	308	4220	2769								7297
5	Panitera	19	451	439		1						910
6	Panitera Muda	3	760	1578		11	1		42			2395
7	Panitera Pengganti	5	1362	3126		24	1	1	120			4639
8	Juru Sita		114	1112	3	424	1	2	917	3		2576
9	Eselon-I	2	4									6
10	Eselon-II	13	72	21								106
11	Eselon-III	8	317	363								688
12	Eselon-IV	2	744	2163	7	86			75			3077
13	JF Ahli Utama	3	4									7
14	JF Ahli Madya	5	71	41								117

No	Jabatan	S-3	S-2	S-1	D-IV	D-III	D-II	D-I	SLTA	SLTP	SD	Total
15	JF Ahli Muda	1	220	356								577
16	JF Ahli Pertama		121	953	7							1081
17	JF Terampil Penyelia		20	100		10			2			132
18	JF Terampil Mahir		10	106		19			4			139
19	JF Terampil		1	105	13	317			6			442
20	JF Terampil Pemula			10		28			2			40
21	Pelaksana	3	428	5238	41	3070		2	449	19	6	9256
22	PPPK		46	3895	11	416	9	6	4628	21	254	9286
Total		656	10161	22655	83	4406	12	11	6245	43	260	44532

Penghargaan Disparitas Data Pegawai

Pada Tahun 2025, Mahkamah Agung meraih penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) atas keberhasilan menyelesaikan disparitas data kepegawaian secara menyeluruh dan berkelanjutan, dari **91,70%** pada tahun 2024 menjadi **100%** pada tahun 2025, sehingga menempatkan Mahkamah Agung sebagai Predikat Nilai Sangat Tinggi dalam kategori Instansi Pusat dengan Jumlah Pegawai Besar Tahun 2025.



Bab 4

MANAJEMEN KEUANGAN, ASET, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

PROGRAM PEMBARUAN

1. Tata Kelola Keuangan Berbasis Teknologi Informasi

Untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, Mahkamah Agung terus memperkuat pengelolaan keuangan melalui pemanfaatan teknologi informasi secara terintegrasi pada seluruh siklus pengelolaan keuangan di Tahun Anggaran 2025. Pemanfaatan sistem berbasis teknologi informasi menjadi instrumen strategis dalam mendukung prinsip *good governance* serta peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan peradilan.

2. Pembaruan Teknologi Informasi

Pada tanggal 17 Oktober 2025, diluncurkan aplikasi BATARA (*Budgeting and Planning for Transparency, Accuracy, and Resources Alignment*), sebuah platform digital terpadu "satu data satu arah" yang mengintegrasikan seluruh sistem perencanaan dan penganggaran yang digunakan di lingkungan Mahkamah Agung, yang menggabungkan 4 aplikasi internal Mahkamah Agung yaitu:

1. e-IPLANS (*Electronic Integrated Planning System*).
2. e-BIMA (*Electronic Budgeting Implementation Monitoring and Accountability*).
3. e-SADEWA (*Electronic State Asset Development and Enhancement Work Application*).
4. SIKEP (Sistem Informasi Kepegawaian).

MANAJEMEN KEUANGAN

1. Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2025

Pada tahun 2025, Laporan Keuangan Mahkamah Agung mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-13 kali secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

2. Penganggaran Berbasis Kinerja

No	Unit Eselon 1	Klasifikasi Rincian Output
1.	Kepaniteraan	Perkara Hukum Perseorangan (1044.BCA)
2.	Ditjen Badan Peradilan Umum	Perkara Hukum Perseorangan (1049.BCA)
3.	Ditjen Badan Peradilan Agama	Koordinasi (1053.AEA)
		Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (1053.QBA)
4.	Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	Perkara Hukum Perseorangan (1058.BCA)
		Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (1059.QBA)

3. Perencanaan Program dan Anggaran Tahun Anggaran 2025

Pada tahun 2025, Mahkamah Agung mendapat Pagu Alokasi Anggaran sebesar Rp12.684.119.652.000. Namun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025, Mahkamah Agung mendapatkan efisiensi sebesar Rp2.288.121.411.000, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Unit Eselon I	Pagu Alokasi 2025	Efisiensi	Relaksasi Efisiensi	Sisa Blokir	Pagu Menjadi 2025
1.	Kepaniteraan	215.971.195.000	17.321.001.000	17.321.001.000	0	226.398.614.000
2.	Badan Peradilan Umum	140.120.478.000	65.374.423.000	64.788.807.000	585.616.000	128.272.021.000
3.	Badan Peradilan Agama	113.719.919.000	61.357.091.000	56.942.270.000	4.414.821.000	99.592.868.000
4.	Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	32.239.930.000	14.596.895.000	14.596.895.000	0	27.793.593.000
5.	Badan Urusan Administrasi	11.903.058.258.000	2.008.794.358.000	1.996.360.224.000	585.616.000	12.416.919.733.000
6.	Badan Pengawasan	77.496.003.000	22.139.515.000	22.139.515.000	0	76.267.962.000
7.	Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	201.513.869.000	98.538.128.000	97.854.288.000	683.840.000	174.348.230.000
Total		12.684.119.652.000	2.288.121.411.000	2.270.003.000.000	18.118.411.000	13.149.966.252.000

4. Kemandirian Anggaran

Mahkamah Agung secara konsisten memperkuat perencanaan dan pengelolaan anggaran yang berbasis kebutuhan nyata lembaga peradilan dan selaras dengan prioritas strategis nasional.

Program Prioritas Nasional

Tahun 2025, Mahkamah Agung menetapkan 18 program prioritas nasional yang merupakan turunan dari RKP 2025;

Hibah

Selama tahun 2025 Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya telah mencatatkan penerimaan hibah langsung dari dalam negeri dan luar negeri, baik dalam bentuk hibah barang, uang dan jasa dengan jumlah nilai perolehan hibah pada tahun 2025 sebesar **Rp310.029.056.006**.

Penerimaan Hibah pada Tahun 2025

Bentuk Hibah	Jumlah Satker	Jumlah Dokumen Hibah	
Hibah Barang	262	480	244.471.481.279
Hibah Uang	8	9	31.908.147.500
Hibah Jasa	33	43	33.649.427.227
TOTAL	303	532	310.029.056.006

Catatan: Sumber Data Aplikasi Sehati dan Aplikasi Batara sampai dengan tanggal 31 Desember 2025

5. Realisasi Anggaran

Tahun 2025, Mahkamah Agung berhasil merealisasi 98,12% dari total pagu anggaran atau setara Rp.12.897.974.521.173.

6. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2025

Realisasi penerimaan PNBP tahun 2025 mencapai Rp113.602.838.895 atau 129,74% dari target yang ditetapkan.

7. Penggunaan Dana PNBP Tahun 2025

Pagu penggunaan dana PNBP tahun 2025 sejumlah Rp31.485.686.000) dan terealisasi sebesar Rp30.294.826.338 atau mencapai 96,22%.

8. Penyelesaian Kerugian Negara Pada Mahkamah Agung Tahun 2025

Tabel Kerugian Negara Tahun 2025 (Dalam Rupiah)

Status Penyelesaian	Jumlah Kasus	Jumlah Kerugian Negara	Pembayaran Angsuran s.d. per Juni Tahun 2025	Sisa Angsuran
A SUDAH PENETAPAN				
1 TGR BENDAHARA	4	1.114.246.950,00	1.114.246.950,00	0
2 TGR NON BENDAHARA	271	3.219.319.047,00	3.208.076.537,00	11.242.510,00
3 PIHAK KETIGA	0	0	0	0
B PROSES PENETAPAN				
1 TGR BENDAHARA	1	22.772.000,00	22.772.000,00	0
2 TGR NON BENDAHARA	0	0	0	0
3 PIHAK KETIGA	0	0	0	0
C INFORMASI				
1 BPK	441	25.105.030.304,98	25.105.030.304,98	0
2 APIP	16	518.543.961,76	518.543.961,76	0
JUMLAH	733	29.979.912.263,74	29.968.669.753,74	11.242.510,00

MANAJEMEN ASET

Capaian Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

- a. Kinerja Penyelesaian Temuan BPK terkait BMN
Progres Tindak Lanjut Penyelesaian Temuan BPK Tahun 2024 adalah sebesar 90,98% dari total 133 temuan.
- b. Indek Pengelolaan Aset (IPA)
Nilai rata rata IPA pada satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung sebesar 3,247 jauh di atas target nasional tahun 2025 sebesar 3,0.
- c. Survey Kepuasan Pengguna Layanan Atas Sarana Pengadilan
Kepuasan pengguna fasilitas layanan PTSP dan layanan persidangan rata-rata di atas 80%.

MANAJEMEN TEKNOLOGI INFORMASI

1. Pembaharuan

Selama tahun 2025 Mahkamah Agung telah melakukan berbagai program strategis di bidang teknologi informasi guna mendukung terwujudnya peradilan yang modern, transparan, dan akuntabel. Capaian kinerja di bidang manajemen teknologi informasi berfokus pada empat aspek utama, yaitu: (1) penguatan infrastruktur teknologi, (2) pengembangan sistem aplikasi peradilan elektronik, (3) peningkatan keamanan dan tata kelola data, serta (4) optimalisasi layanan berbasis digital kepada publik.

2. Capaian

a. Pengembangan Sistem Informasi

Pengembangan aplikasi di lingkungan Mahkamah Agung, antara lain:

1. Smart Majelis untuk Pengadilan Tingkat Pertama
2. Sistem Informasi Penelusuran Perkara Versi 6.0.1
3. e-BERPADU Upaya Hukum Banding
4. Sistem Informasi Administrasi Perkara Mahkamah Agung Terintegrasi (SIAP MA Terintegrasi)
5. ISO/IEC 20000-1:2018
6. Layanan Notifikasi Whatsapp Bisnis MA RI
7. Web Badan Urusan Administrasi

b. Pemeliharaan Sarana Informatika

Dalam rangka menjaga keberlanjutan, keandalan, dan keamanan infrastruktur teknologi informasi di lingkungan Mahkamah Agung, berbagai kegiatan pemeliharaan sarana informatika telah dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan.



Bab 5

Analisis Kebijakan Hukum dan Peradilan serta Putusan Penting (*Landmark Decision*)

PROGRAM PEMBARUAN

Peningkatan Kualitas SDM

Saat ini telah diajukan nama-nama calon analis kebijakan yang telah mengikuti diklat dan memenuhi kualifikasi untuk mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), guna membekali pegawai dengan kemampuan analitis, metodologis, dan politis dalam merumuskan kebijakan berbasis data dan bukti untuk kemudian dilanjutkan dengan advokasi rekomendasi kebijakan.

Model Penguatan Dampak Hasil

Di samping meningkatkan intensitas komunikasi sebagai upaya advokasi hasil kajian untuk menjadi suatu kebijakan, Pustrajak juga aktif menyusun artikel berbasis hasil kajian yang dimuat di Suara BSDK (www.suarabsdk.com) sebagai bentuk kontribusi dalam pengembangan sistem peradilan.

PENYUSUNAN REKOMENDASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN

Pelaksanaan analisis kebijakan dan evaluasi kebijakan pada tahun 2025 diwujudkan dalam bentuk penyusunan Naskah Akademik, Naskah Kebijakan (Policy Paper) dan Naskah Urgensi sebanyak 25 topik sebagai berikut.

1. Naskah Urgensi Rancangan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Penyelesaian Eksekusi Gugatan Sederhana
2. Naskah Urgensi Perubahan PERMA Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan
3. Naskah Kebijakan Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
4. Naskah Urgensi Tata Cara Pemberian Pengakuan Dan Bantuan Atas Permohonan Pengakuan Proses Kepailitan Asing Antar Lintas Negara
5. Naskah Kebijakan Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Di Tingkat Desa

6. Naskah Urgensi Harmonisasi Pendidikan dan Kesejahteraan Prajurit TNI Yang Bertugas Di Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer
7. Naskah Kebijakan Implementasi Penyelesaian Sengketa Perdata Perdagangan Karbon Di Indonesia
8. Policy Brief Reformulasi Hak Dan Kedudukan Jabatan Hakim Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya
9. Naskah Kebijakan tentang Kewenangan Pelantikan Calon Hakim Menjadi Hakim Oleh Ketua Mahkamah Agung
10. Naskah Urgensi Rancangan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Tentang Standardisasi Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
11. Naskah Urgensi Rancangan PERMA Tentang Pedoman Penghitungan Uang Kompensasi Dalam Sengketa Kepegawaian
12. Naskah Urgensi Tentang Pencegahan Dan Penanganan Contempt Of Court: Reformasi Kelembagaan Dan Independensi Peradilan
13. Naskah Urgensi Pengembangan Kompetensi Hakim Dan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Melalui Jalur Pendidikan
14. Naskah Kebijakan Pembaruan Hukum Acara Pidana Militer
15. Naskah Akademik Rancangan PERMA Keterbukaan Informasi dan Perlindungan Data Pribadi
16. Naskah Urgensi Rancangan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Hukum
17. Naskah Kebijakan Tentang Upaya Peningkatan Kualitas Layanan Hukum Kepada Masyarakat Di Tengah Kekurangan Tenaga Teknis
18. Naskah Urgensi Pengaturan Penyesuaian Gaji Pokok Hakim Dan Penghasilan Pensiun Hakim Sebagai Tindak Lanjut Pp Nomor 44 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas PP Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung
19. Urgensi Rancangan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum Dan Persidangan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Di Mahkamah Agung Secara Elektronik
20. Naskah Urgensi Peraturan Presiden Tentang Pengalihan Pembinaan Organisasi, Administrasi dan Keuangan Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung
21. Naskah Urgensi Peraturan Presiden Tentang Sekretariat Mahkamah Agung
22. Naskah Kebijakan Peradilan In Absentia dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus
23. Naskah Urgensi Rancangan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Tentang Standardisasi Klasifikasi Perkara Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
24. Naskah Urgensi Rancangan Perubahan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
25. Naskah Kebijakan Penguatan Keamanan Peradilan Di Indonesia

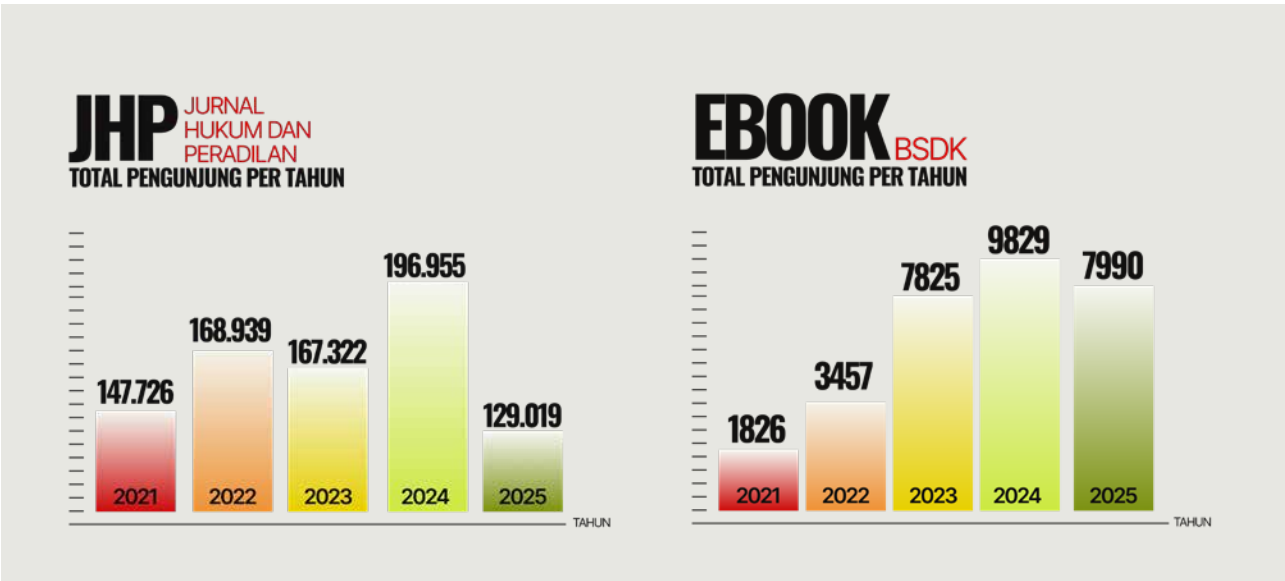
ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PUBLIKASI

Advokasi kebijakan

No	Topik Naskah	Tahun Penyusunan	Tindak Lanjut
1.	Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Hakim	2022	Telah menghasilkan produk kebijakan berupa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pengadaan Hakim Pengadaan Pengadilan Tingkat Pertama
2.	Naskah Urgensi Manajemen Kinerja dan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Dalam Mendukung Fungsi Regulator Pada Mahkamah Agung RI	2024	Telah menghasilkan produk kebijakan berupa Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2848/M.SM.01.00/2025 Tanggal 24 Juni 2025 Tentang Persetujuan Usulan Kebutuhan JF Analis Kebijakan di Lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung
3.	Naskah Urgensi tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia	2024	Telah menghasilkan produk kebijakan berupa Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 5141/SEK/SK/OT1.1/V/2025 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia
4.	Naskah Urgensi Rancangan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Kepailitan (Al-Taflis) Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Nadhirah) Pada Lembaga Keuangan Syariah	2024	Telah ditindaklanjuti dengan terbitnya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 130/KMA/SK.HK2.5/VII/2025 tentang Kelompok Kerja Penanganan Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Menurut Prinsip Syariah (Taflis)

Publikasi

Berdasarkan data jumlah pengunjung Jurnal Hukum dan Peradilan selama lima tahun terakhir, terlihat adanya fluktuasi yang cukup signifikan dalam tren kunjungan. Data tersebut menandakan meningkatnya ketertarikan publik terhadap Jurnal Hukum dan Peradilan, baik dari kalangan akademisi, praktisi, maupun masyarakat umum.



LANDMARK DECISION

KAMAR PIDANA

Nomor Perkara	6617 K/Pid.Sus/2025
Jenis dan Klasifikasi Perkara	Pidana Khusus / Tindak Pidana Korupsi
Majelis Hakim	1. Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H. 2. Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H. 3. Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.
Kaidah Hukum	Dalam perkara tindak pidana korupsi, kerugian lingkungan hidup (termasuk kerusakan ekologi dan biaya pemulihan yang dapat dihitung secara ekonomis) tidak diperlakukan sebagai kerugian keuangan negara dalam pengertian Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 18 UU Tipikor, karena kerugian negara dalam tipikor hanya ditentukan oleh pengeluaran yang tidak semestinya atau hilangnya potensi penerimaan negara yang dapat dihitung secara pasti, sedangkan kerusakan/kerugian lingkungan wajib ditegakkan dan dipulihkan melalui rezim hukum lingkungan (pidana, perdata, dan administratif) yang berdiri sendiri agar tujuan pemulihan ekologis tercapai secara optimal.

KAMAR PERDATA

Nomor Perkara	297 PK/Pdt/2024
Jenis dan Klasifikasi Perkara	Perdata Umum / Sengketa Lingkungan Hidup
Majelis Hakim	1. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. 2. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. 3. Dr. Hamdi, S.H., M.Hum. 4. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. 5. Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
Kaidah Hukum	Korporasi tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban perdata atas dasar tanggung jawab mutlak (strict liability) tanpa harus dibuktikan adanya unsur kesalahan, sepanjang terdapat kerugian dan hubungan kausalitas antara kegiatan usaha dan kerusakan lingkungan yang terjadi.

Nomor Perkara	1025 PK/Pdt/2025
Jenis dan Klasifikasi Perkara	Perdata Umum / Sengketa Kepemilikan Barang Bukti
Majelis Hakim	1. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. 2. Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. 3. Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
Kaidah Hukum	Bahwa hukum acara perdata tidak mengenal adanya bantahan (derden verzet) terhadap putusan perkara pidana, karena kedua bidang hukum tersebut berada dalam ranah yang berbeda.

Nomor Perkara	3091 K/Pdt/2025
Jenis dan Klasifikasi Perkara	Perdata Umum / Perbuatan Melawan Hukum
Majelis Hakim	1. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. 2. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. 3. Agus Subroto, S.H., M.Kn.
Kaidah Hukum	Tindakan mal-administrasi dalam lapangan hukum administrasi negara bukan merupakan perbuatan melawan hukum di bidang keperdataan, sepanjang telah dilakukan secara cermat dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan untuk melindungi kepentingan umum.

Nomor Perkara	684 K/Pdt.Sus-PHI/2025
Jenis dan Klasifikasi Perkara	Perdata Khusus / Perselisihan Hubungan Industrial
Majelis Hakim	1. Agus Subroto, S.H., M.Kn. 2. Dr. Sugeng Santoso PN., S.H., M.M., M.H. 3. Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.
Kaidah Hukum	Mediasi tripartit sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 harus melibatkan semua pihak yang dibuktikan dengan risalah dan anjuran.

Nomor Perkara	6 PK/Pdt.Sus-HKI/2025
Jenis dan Klasifikasi Perkara	Perdata Khusus / Sengketa Hak Cipta
Majelis Hakim	1. Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. 2. Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum. 3. Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.
Kaidah Hukum	Penyelenggara aplikasi digital yang memperoleh keuntungan dari penggunaan karya cipta tanpa izin tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab hukum dalam penggunaan karya cipta tanpa izin.

KAMAR AGAMA

Nomor Perkara	244 K/Ag/2025
Jenis dan Klasifikasi Perkara	Perdata Agama / Ekonomi Syariah
Majelis Hakim	1. Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. 2. Dr. H. Abdul Manaf, M.H. 3. Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.
Kaidah Hukum	Perkara ekonomi syariah tidak hanya ditentukan oleh akad syariah secara eksplisit, tetapi dapat ditentukan dari materi akad yang kegiatannya secara implisit didasarkan prinsip.

Nomor Perkara	47 PK/Ag/2025
Jenis dan Klasifikasi Perkara	Perdata Agama / Pembatalan Perkawinan
Majelis Hakim	1. Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. 2. Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.Hum. 3. Dr. H. Abdul Manaf, M.H.
Kaidah Hukum	Perkawinan yang putus karena kematian tidak dapat dibatalkan, akan tetapi dalam hal perkawinan tersebut terdapat itikat tidak baik yang dibuktikan dengan putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap dapat dijadikan dasar mengajukan gugatan agar perkawinan tersebut dinyatakan tidak menimbulkan akibat hukum terhadap harta bersama dan kewarisan bagi pasangan yang hidup lebih lama.

KAMAR MILITER

Nomor Perkara	173 K/Mil/2025
Jenis dan Klasifikasi Perkara	Pidana Militer / Turut Serta Melakukan Penipuan
Majelis Hakim	1. Hidayat Manao, S.H., M.H. 2. Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. 3. Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.
Kaidah Hukum	Pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan secara bersyarat.

Nomor Perkara	16 K/Mil/2025
Jenis dan Klasifikasi Perkara	Pidana Militer / Persetubuhan di Luar Perkawinan
Majelis Hakim	1. Hidayat Manao, S.H., M.H. 2. Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. 3. Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.
Kaidah Hukum	Penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa yang melakukan kekerasan seksual secara keji dapat dibenarkan.

KAMAR TUN

Nomor Perkara	256 K/TUN/2025
Jenis dan Klasifikasi Perkara	Tata Usaha Negara / Lain-lain Termasuk Piutang
Majelis Hakim	1. Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H. 2. Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. 3. Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.
Kaidah Hukum	Intervensi pribadi pengendali korporasi terhadap kegiatan lembaga keuangan menimbulkan tanggung jawab administratif personal dan menjadi dasar kewenangan otoritas pengawas keuangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap individu tersebut.



Bab 6

Pengawasan

PROGRAM PEMBARUAN

WASKITAMA (Pengawasan Kinerja Tata Kelola Mahkamah Agung)

Pada momen Peringatan HUT MA ke-80 Tahun 2025, Mahkamah Agung meluncurkan Aplikasi WASKITAMA (Pengawasan Kinerja Tata Kelola Mahkamah Agung), sebuah platform inovatif pengawasan terpadu yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kinerja lembaga peradilan di seluruh Indonesia.

PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN

Penguatan sistem pengawasan meliputi: Evaluasi Mandiri atas Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Penilaian Pembangunan dan Evaluasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), E-Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi dan Pelaporan Penanganan Gratifikasi.

Evaluasi Mandiri Atas Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

Dari 103 unit kerja yang diusulkan berpredikat WBK, sebanyak 19 unit kerja (19%) memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), yang terdiri dari 7 satuan kerja Peradilan Umum, 10 satuan kerja Peradilan Agama, dan 2 satuan kerja Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian sejak tahun 2018 hingga tahun 2025, sebanyak 278 satuan kerja telah meraih predikat WBK.

Penilaian Pembangunan dan Evaluasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

Tabel Satuan Kerja Yang Berhasil Menerapkan SMAP Tahun 2025

No.	Satuan Kerja	Predikat	Kategori
1	Pengadilan Agama Bogor	A	88,42
2	Pengadilan Agama Tangerang	A	86,37
3	Pengadilan Negeri Tasikmalaya	A	86,03
4	Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta	A	85,97
5	Pengadilan Militer II-09 Bandung	B	84,34
6	Pengadilan Negeri Mojokerto	B	83,98
7	Pengadilan Agama Denpasar	B	81,23
8	Pengadilan Agama Yogyakarta	B	81,03
9	Pengadilan Negeri Banyuwangi	B	79,10
10	Pengadilan Negeri Bantul	B	78,94
11	Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya	B	77,94
12	Pengadilan Negeri Palangkaraya	B	77,13
13	Pengadilan Agama Jakarta Utara	B	76,57
14	Pengadilan Negeri Malang	B	76,38
15	Pengadilan Negeri Tulungagung	C	72,02
16	Pengadilan Agama Banjarmasin	A	86,04
17	Pengadilan Negeri Pati	B	80,35
18	Pengadilan Agama Jakarta Selatan	B	79,63
19	Pengadilan Negeri Klaten	B	79,52
20	Pengadilan Agama Magelang	B	78,32
21	Pengadilan Negeri Jambi	B	76,10
22	Pengadilan Agama Makassar	C	69,47

E-Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi

Pelaksanaan e-learning ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan pemahaman seluruh aparaturnya mengenai konsep gratifikasi, mekanisme pelaporan, serta implikasi hukumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui Elearning ini, diharapkan mampu membedakan antara pemberian yang termasuk kategori gratifikasi yang wajib dilaporkan dan pemberian yang diperbolehkan sesuai ketentuan.

PENGELOLAAN SISTEM PENGAWASAN

Penanganan Pengaduan

Tabel Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Tahun 2025

No.	Jenis Tindaklanjut	Jumlah Tindaklanjut	
1.	Masih dalam proses penyelesaian		1.298
2.	Selesai diproses		4.263
2.a	Pengaduan yang diperiksa:		
	a. Diperiksa Tim Bawas	127	
	b. Delegasi Pemeriksaan	95	
2.b.	Pengaduan tidak memenuhi syarat pemeriksaan:		
	a. Konfirmasi	293	
	b. Klarifikasi	1.068	
2.c.	Pengaduan tidak memerlukan pemeriksaan lebih lanjut:		
	a. Memorandum/delegasi internal	103	
	b. Surat jawaban	1.259	
	c. Pelaksanaan pemantauan	87	
	d. Pengarsipan	114	
	e. Gabung berkas	1.117	
Jumlah			5.561

Tindaklanjut Usul Sanksi Komisi Yudisial

Tabel Tindak Lanjut Usul Sanksi Surat Komisi Yudisial Tahun 2025

No.	Jenis Tindak Lanjut	Jumlah Berkas Usulan	Jumlah Hakim
1	Telah ditindaklanjuti	9	12
2	Tidak dapat ditindaklanjuti (Substansi Teknis Yudisial)	17	33
3	Masih dalam proses tindak lanjut	10	16
Total		36	61

Sidang Majelis Kehormatan Hakim

Pada tahun 2025 Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial melaksanakan Sidang Majelis Kehormatan Hakim untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim terhadap 5 (lima) orang hakim.

Penjatuhan Sanksi/Hukuman Disiplin

Tabel Sanksi/Hukuman Disiplin Tahun 2025.

No.	Jabatan	Jenis Sanksi/Hukuman Disiplin			Jumlah
		Berat	Sedang	Ringan	
1.	Hakim	21	19	62	102
	Hakim <i>ad hoc</i>	-	1	3	4
2.	Panitera	3	2	7	12
3.	Secretaries	3	1	7	11
4.	Panitera muda	3	3	5	11
5.	Panitera pengganti	5	8	6	19
6.	Jurusita	2	7	3	12
7.	Jurusita pengganti	2	2	2	6
8.	Pejabat struktural	-	2	9	11
9.	Pejabat fungsional	1	2	1	4
10.	Pelaksana	6	9	6	21
11.	PPNPN	4	-	3	7
Jumlah		50	56	114	220

Kegiatan Pemeriksaan Reguler

Tabel Data Pengawasan Reguler Tahun 2025

Lingkungan Peradilan	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Jumlah
Peradilan umum	7	9	7	4	27
Peradilan agama	6	21	4	1	32
Peradilan militer	1	-	-	-	1
Peradilan TUN	1	-	1	-	2
Total	15	30	12	5	62

Audit Kinerja

Tabel Pelaksanaan Audit Kinerja Pada Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2025

Lingkungan Peradilan	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Jumlah
Peradilan umum	3	6	4	1	14
Peradilan agama	1	4	3	-	8
Peradilan TUN	-	-	-	-	-
Peradilan militer	-	-	-	-	-
Jumlah	4	10	7	1	22

Satuan Tugas Khusus Badan Pengawasan Pada Mahkamah Agung

Mahkamah Agung RI melalui Badan Pengawasan membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgassus) yang memantau kedisiplinan aparatur di lingkungan kantor Mahkamah Agung, mengawasi ketaatan terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim dan aparatur pada Mahkamah Agung, serta mengawasi mekanisme penyelesaian perkara agar penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Pengadilan Tingkat Pertama Pada Wilayah Jakarta

Tabel Pelaksanaan Satgasuss pada Wilayah Jakarta

No	Nama Satker	Jumlah Pelaksanaan Satgassus
1	Pengadilan Negeri Jakarta Utara	9
2	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	9
3	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	9
4	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	9
5	Pengadilan Negeri Jakarta Timur	9
6	Pengadilan Agama Jakarta Pusat	8
7	Pengadilan Agama Jakarta Barat	8
8	Pengadilan Agama Jakarta Utara	8
9	Pengadilan Agama Jakarta Selatan	8
10	Pengadilan Agama Jakarta Timur	8
11	Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta	8

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Pada Tahun 2025 Badan Pengawasan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja tahun anggaran 2024 terhadap unit kerja eselon I dan peradilan tingkat banding sejumlah 87 (delapan puluh tujuh) satker.

Profiling Integritas Hakim dan Aparatur Peradilan

Jumlah *profiling* hakim tahun 2025 mencapai 1.931 hakim dan aparatur, atau meningkat hampir empat kali lipat dibandingkan tahun 2023.

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Hingga Semester I Tahun 2025, Mahkamah Agung RI telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK yang terdiri dari 826 temuan dengan total nilai temuan sebesar Rp80.404.156.557,05.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Pada tahun 2025, dari total 17.619 Wajib Lapor, sebanyak 17.618 Wajib Lapor atau 99,99% telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Bab 7

Peran Serta Dan Kerja Sama

KERJASAMA MULTILATERAL

Council of ASEAN Chief Justices (CACJ)

Pertemuan CACJ ke 12

Pertemuan CACJ ke 12 dilangsungkan di Singapura tanggal 14 November 2025, dihadiri oleh pimpinan Mahkamah Agung dari 10 negara ASEAN serta Timor Leste sebagai *observer*. Delegasi Mahkamah Agung RI dipimpin langsung oleh YM Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. Sunarto, SH., MH, didampingi oleh YM Ketua Kamar Pembinaan Syamsul Maarif, SH., LL.M., Ph.D., dan YM Ketua Kamar Perdata I Gusti Agung Sumanatha, SH., MH., Selain itu hadir pula Hakim Agung YM Dr. Nani Indrawati, SH., MH, dan Sekretaris Mahkamah Agung RI Sugianto, SH., MH., serta didampingi oleh Aria Suyudi, Dian Rositawati, Rizkiansyah, Armansyah dan Syahrul Malik.

Mahkamah Agung RI sebagai Co-Chair WG JET

Mahkamah Agung aktif sebagai Co-Chair Kelompok Kerja Pendidikan dan Pelatihan (WG JET) bersama dengan

Mahkamah Agung Filipina. Di antara kegitannya pada tahun 2025 adalah Pengkajian TPPO bagi hakim ASEAN yang melibatkan dua komponen utama, yaitu:

- Pengembangan Model *Professional Development Program for ASEAN Judges on Trafficking in Persons*. Tahun 2025 ada 3 (tiga) kegiatan, yang meliputi, 1) Asesmen Kebutuhan Pelatihan untuk perbaikan dokumen Model Program Pengembangan Professional; 2) Workshop Regional tentang revisi Model Program Pengembangan Profesional bagi Hakim ASEAN dalam TPPO 2018, yang dilakukan pada 14-15 Mei 2025 di Bangkok, Thailand; 3) Workshop Perbaikan Model Program Pengembangan Professional bagi Hakim ASEAN dalam TPPO 2018, yang dilaksanakan pada 23-24 Juli 2025 di Bangkok.
- Pelaksanaan Dialog Pertukaran Pengetahuan (*Judicial Knowledge Exchange*) tentang Ajudikasi Sensitif Korban dalam Perkara TPPO, tanggal 29 September- 1 Oktober 2025 di Vientiane, Laos.

Pertemuan Minggu Kerja CACJ (CACJ Working Week 2025)

CACJ Working Week Pertama (CACJWW2025) diselenggarakan di Bangkok, Thailand, pada tanggal 21 hingga 25 Juli 2025 dengan CACJ Thailand sebagai tuan rumah.

Standing International Forum for Commercial Court (SIFOCC)

Hakim Agung Kamar Perdata YM Agus Subroto, SH., MH., didampingi oleh Dr. Aria Suyudi, SH., LL.M., mewakili Mahkamah Agung RI menghadiri pertemuan *Standing International Forum for Commercial Court* (SIFOCC) ke 5 (lima) yang diadakan di New Delhi, India, pada 8-9 November 2025.

Kehadiran Mahkamah Agung RI dalam Forum Multilateral terkait lingkungan hidup dan keadilan iklim

a. Open Government Partnership (OGP) Asia and Pacific Regional Meeting 2025

Mahkamah Agung Republik Indonesia berpartisipasi dalam rangkaian OGP Asia and Pacific Regional Meeting 2025 yang diselenggarakan di Manila, Filipina, pada Februari 2025, yang diwakili oleh Dr. Nani Indrawati, S.H., M.H., Hakim Agung Kamar Perdata Mahkamah Agung RI.

b. Partisipasi pada The 2025 United Nations Climate Change Conference or Conference of the Parties to the UNFCCC (COP 30)

Komitmen Mahkamah Agung RI dalam agenda keadilan iklim juga ditunjukkan melalui kehadiran dalam COP 30 UNFCCC yang diselenggarakan di Belém, Brasil, 15 November 2025. Dalam forum ini, Mahkamah Agung RI diwakili oleh Ketua Kamar Pidana, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

c. Pengembangan Fasilitas E-Learning Hakim ASEAN Bidang Ajudikasi Perkara Perubahan Iklim

Melanjutkan pengelolaan fasilitas *e-learning* yang telah ada, Mahkamah Agung RI memperluas materi pelatihan dengan menambahkan Modul Ajudikasi Perkara Perubahan Iklim. Modul ini telah diuji coba pada Oktober 2025 dan memperoleh persetujuan untuk digunakan secara resmi oleh para Ketua Mahkamah Agung negara-negara ASEAN pada Pertemuan *Chief Justices of ASEAN* (CACJ) ke-12 di Singapura.

KERJASAMA BILATERAL

Kerjasama Luar Negeri

Hoge Raad Kerajaan Belanda

Presiden *Hoge Raad* Belanda, Dineke De Groot melakukan kunjungan kerja ke Mahkamah Agung RI pada tanggal 15-21 Juni 2025. Dalam kunjungan kali ini Dineke De Groot didampingi Hon. Mariken Van Hilten, Wakil Ketua Mahkamah Agung Kerajaan Belanda sekaligus menjabat Ketua Kamar Pajak dan Hon. Tijs Kooijmans, Hakim Agung pada Kamar Pidana.

Federal Court of Australia (FCA)

Kunjungan Kerja *Federal Court of Australia*

Pada tanggal 29 September 2025 sampai 3 Oktober 2025 Mahkamah Agung RI menerima kunjungan kerja delegasi *Federal Court of Australia* yang dipimpin langsung oleh *Chief Justice* Debra Mortimer. Delegasi ini terdiri dari hakim-hakim senior seperti *Justice* Stephen Burley, *Justice* Michael O Bryan, *Justice* Catherine Button, dan didampingi oleh *Judicial Registrar* Luxton dan Martin Clutterbuck, *International Program Manager*.

Dialog Yudisial

Kolaborasi Mahkamah Agung RI dengan *Federal Court of Australia* (FCA) mencapai momen penting dalam Dialog Yudisial yang diselenggarakan di Badan Strajak Diklat Hukum dan Peradilan (BSDK), Kamis (2/10/2025). Pertemuan yang dihadiri seluruh pimpinan Mahkamah Agung RI serta dipimpin langsung oleh *Chief Justice* Debra Mortimer ini berfokus pada berbagi praktik terbaik untuk menciptakan peradilan yang tidak hanya adil, tetapi juga cepat, mudah diakses, dan responsif terhadap tantangan kontemporer.

Kunjungan Kerja Delegasi *Federal Circuit and Family Court of Australia*

Pada 23–26 September 2025, delegasi *Federal Circuit and Family Court of Australia* (FCFCoA) Hakim Agung Suzanne Christie didampingi oleh penasihat Leisha Lister dan Cate Sumner, melakukan kunjungan kerja ke Mahkamah Agung RI. Kunjungan ini didukung oleh Australia Indonesia Partnership Justice 3 (AIP J3) sebagai bagian dari implementasi MoU FCFCoA–MA RI.

Seleksi Fellowship Hakim ke *Federal Court of Australia*: Menyiapkan Agen Pembaruan Hukum Komersial

Mahkamah Agung RI menyelenggarakan seleksi wawancara program fellowship bagi hakim untuk menimba ilmu di *Federal Court of Australia* (FCA). Kegiatan dilaksanakan secara hybrid pada Rabu (3/10) ini dihadiri secara langsung oleh pimpinan Mahkamah Agung, termasuk Ketua Kamar Pembinaan dan Ketua Kamar Perdata, serta perwakilan dari *Federal Court of Australia* dan *Australia Indonesia Partnership for Justice 3* (AIP J3).

Kerjasama Nasional

Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan RI

Mahkamah Agung Republik Indonesia kembali menjalin Nota Kesepahaman dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai wujud penguatan kerja sama antar lembaga negara dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penguatan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di bidang bank sentral dan sektor jasa keuangan. Nota kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung RI, bersama Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Dewan Komisiner OJK, serta disaksikan oleh pimpinan dan pejabat tinggi ketiga lembaga, bertempat di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat.

Temu Wicara di Bidang Kebanksentralan dan Sektor Jasa Keuangan

BSDK menyelenggarakan Temu Wicara di Bidang Kebanksentralan dan Sektor Jasa Keuangan melalui kemitraan strategis dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, yang diikuti oleh 80 hakim dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara, yang dilaksanakan di Medan pada 28 Juli–8 Agustus 2025 dan di Malang pada 17–26 September 2025.

Kerjasama Dengan Mitra Pembangunan Dan Organisasi Masyarakat Sipil

Australia Indonesia Partnership For Justice

Tahun 2025 menandai berakhirnya fase kedua program AIPJ dan rencananya akan dilanjutkan dengan AIPJ Fase 3 yang akan beroperasi penuh pada pertengahan 2026.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)

Sepanjang tahun 2025, kemitraan Mahkamah Agung dan UNODC diwujudkan melalui berbagai program peningkatan kapasitas yang bersifat tematik dan aplikatif, meliputi lokakarya, pelatihan simulasi persidangan, dan dialog peradilan, dengan fokus pada kejahatan maritim, lingkungan hidup, dan kejahatan lintas negara.

International Center for Missing and Exploited Children (ICMEC)

BSDK Mahkamah Agung menjalin kemitraan global dengan *International Center for Missing and Exploited Children* (ICMEC) guna memperkuat perlindungan anak dalam sistem peradilan, melalui program pelatihan dilaksanakan dalam dua gelombang di Bali, yaitu Gelombang I (5–7 Februari 2025) dan Gelombang II (11–13 Juni 2025).

Japan International Cooperation Agency (JICA)

Sepanjang 2025 kerjasama Mahkamah Agung dan JICA meliputi:

1. Program pelatihan *Knowledge Co-Creation Program* (KCCP) tentang Hak atas Kekayaan Intelektual, di Tokyo Jepang yang dilaksanakan pada bulan Juli 2025, diikuti oleh 15 orang Hakim.
2. *Short Course* Hak Kekayaan Intelektual, yang dilaksanakan di Surabaya pada bulan September 2025 yang diikuti oleh 30 orang hakim.
3. Penerbitan Buku II Pedoman Penyelesaian Perkara Hak Kekayaan Intelektual Tentang Hak Cipta, yang diluncurkan pada tanggal 27 Februari 2025 di Movenpick Hotel Jakarta.
4. Sosialisasi Pedoman Penyelesaian Perkara Hak Kekayaan Intelektual Buku I tentang Merek dan Buku II tentang Hak Cipta serta Buku Kumpulan Putusan Pengadilan Indonesia dan Jepang tentang Hak Kekayaan Intelektual Jilid 1 dan Jilid 2 di Semarang pada tanggal 22 Mei 2025, Medan pada tanggal 19 Juni 2025 dan Makassar pada tanggal 7 Agustus 2025.
5. Program Beasiswa Pendidikan Magister (S2) di bidang *Legal and Judicial Human Resources Development* pada perguruan tinggi di Jepang, yang berlangsung pada periode Oktober 2025–September 2027.

Kerjasama dengan Organisasi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan

Sepanjang 2025 MARI tercatat bekerja bersama *Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)*, Lembaga Kajian untuk Independensi Peradilan (LeIP) dan *Center for Detention Studies (CDS)*.

KUNJUNGAN KERJA

Kunjungan Delegasi Mahkamah Agung ke Luar Negeri

Opening Legal Year Singapore 2025

Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. Sunarto, SH., MH., memenuhi undangan *Supreme Court of Singapore* menghadiri acara *Opening Legal Year Singapore 2025* pada Senin 13 Januari 2025.

Opening Legal Year 2025 - Malaysia

Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., menghadiri upacara *Opening Legal Year (OLY) Malaysia 2025* pada 8 Januari 2025 di Putrajaya *International Convention Center*, Malaysia.

13th International Legal Forum of Asia and the Pacific St. Petersburg

Ketua Kamar Pembinaan MARI - Syamsul Maarif, SH., LL.M., PhD., didampingi oleh staf khusus Ketua Mahkamah Agung, Dr. Aria Suyudi, SH., LL.M. menghadiri undangan Mahkamah Agung Rusia untuk menghadiri *Internasional Asia Pacific Legal Reform Forum ke-13* di St. Petersburg tanggal 21-24 September 2025.

Model Forest Act Initiative Knowledge Sharing Roundtable & Consultation

Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Bambang H Mulyono, SH., MH mewakili Mahkamah Agung RI sebagai pembicara ahli pada acara *Model Forest Act Initiative (MoFAI) Knowledge Sharing Roundtable and Consultation* di Tokyo 25 September 2025, yang diselenggarakan oleh *Asian Development Bank Institute*. Acara ini diselenggarakan bersama antara ADB dan UNEP.

7th China-ASEAN Legal Cooperation Forum, Chongqing, China.

Atas undangan *China Law Society*, Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial YM Suharto, S.H., M.H., memimpin delegasi Mahkamah Agung RI untuk menghadiri *Pertemuan Forum Kerja Sama Hukum Tiongkok-ASEAN ke-7* yang diselenggarakan pada 20-22 November 2024 di Chongqing.

Workshop Bank Liquidation Dispute Resolution Mechanism: A Comparative Study of the UK and Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Kepolisian Republik Indonesia mengikuti studi banding bertajuk *Bank Liquidation Dispute Resolution Mechanism: A Comparative Study of the UK and Indonesia* yang diselenggarakan di London, Inggris, pada 5-9 Mei 2025.

Kunjungan Pimpinan Mahkamah Agung RI ke Dewan Peradilan Agung Kuwait

Delegasi Mahkamah Agung RI yang dipimpin oleh YM Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial H. Suharto, S.H., M.Hum., melakukan kunjungan ke Dewan Peradilan Agung Kuwait pada tanggal 5-9 Januari 2025. YM Wa. KMA Non Yudisial didampingi oleh Ketua Kamar Agama Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Ketua Kamar Pidana Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H., Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Drs. H. Muchlis, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Agama Soreang Abu Jahid Darso Atmojo, LC., LL.M., Ph.D, dan Hakim Yustisial/Asisten Ketua Mahkamah Agung Dr. H. Edi Hudiata, Lc., M.H.

APEC Workshop on Enhancing the APEC Collaborative Framework and Use of ODR, 12-14 November 2025, Tokyo, Jepang

Mahkamah Agung Republik Indonesia diwakili oleh Andhy Martuaraja, S.H., M.H., Hakim Yustisial pada Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, menghadiri *APEC Workshop on Enhancing the APEC Collaborative Framework and Use of Online Dispute Resolution* yang diselenggarakan di Tokyo, Jepang, pada 12-14 November 2025.

UNESCO training on AI and the Rule of Law for Southeast Asian Member States

Mahkamah Agung RI mengirimkan delegasi untuk mengikuti Pelatihan Internasional mengenai penggunaan Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence/AI*) dalam Sistem Peradilan yang diselenggarakan pada 12–14 November 2025 di Bangkok.

Partisipasi pada Delegasi Akses HCCH 1965 Convention on Service in Civil Process

Staf Khusus Ketua Mahkamah Agung RI Dr. Aria Suyudi, SH., LL.M. atas undangan dari Direktorat Otoritas Pusat Hukum Internasional Kementerian Hukum RI berpartisipasi dalam kunjungan kerja delegasi Kementerian Hukum RI untuk menjajaki peluang akses konvensi HCCH 1965 tentang *Service in Civil process* ke Singapura.

6th UNCITRAL Asia Pacific Judicial Summit 2025: Judicial Conference – “Building towards End-to-End Digitalization”

Mahkamah Agung RI diwakili Frensita Kesuma Twinsani, S.H., M.Si., M.H. (Hakim Yustisial pada Pusdiklat Teknis, BSDK MA RI), Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Negeri Singaraja) menghadiri acara Konferensi Tingkat Tinggi Yudisial UNCITRAL ke 6 di Hong Kong (6th UNCITRAL Asia Pacific Judicial Summit 2025: Judicial Conference bertajuk “Building towards End-to-End Digitalization” dalam rangkaian Hong Kong Legal Week yang diadakan tanggal 1 dan 2 Desember 2025.

Kunjungan Kerja Pengamanan Pengadilan ke Federal Court of Australia

Delegasi Mahkamah Agung RI melaksanakan kunjungan kerja ke Melbourne, Australia, pada 16–21 November 2025 dalam rangka penguatan sistem keamanan peradilan, manajemen risiko. Kunjungan ini merupakan bagian dari kerja sama bilateral pengadilan dengan *Federal Court of Australia* yang juga melibatkan dukungan *Australia Indonesia Partnership for Justice 3* (AIP J3).

Kunjungan Kerjasama Pendidikan Hakim ke Judicial Research and Training Institute (JRTI), Supreme Court of Korea

Mahkamah Agung melalui BSDK mengikuti kegiatan *Training of Judicial Capacity Building* yang diselenggarakan oleh *Judicial Research and Training Institute (JRTI), Supreme Court of Korea*, pada 7–13 Desember 2025 di Seoul, Korea Selatan.

Kunjungan Delegasi Internasional ke Mahkamah Agung

Mahkamah Agung Jepang

Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI menerima kunjungan delegasi *Supreme Court of Japan* yang dipimpin oleh Justice Masaaki Oka pada 3 Juni 2025.

Southwest University of Political Science & Law Tiongkok

Pada 29 Juli 2025, delegasi Southwest University of Political Science & Law (SWUPL) yang dipimpin oleh Mr. Fan Wei selaku Sekretaris Partai Komunis China sekaligus Rektor SWUPL melakukan kunjungan kerja ke Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai bagian dari kerja sama jangka panjang kedua institusi.

China Law Society

Pada 9 Desember 2025, Ketua Mahkamah Agung didampingi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dan Non Yudisial, Ketua Kamar Pembinaan, serta Ketua Kamar Perdata menerima kunjungan kehormatan delegasi *China Law Society* (CLS) yang dipimpin oleh Mr. Yan Wanming selaku *Vice President of CLS*.

Mahkamah Agung Filipina

Pada tanggal 3-6 November 2025 lalu Mahkamah Agung RI menerima kunjungan kerja Justice Amy C Lazaro-Javier dari Mahkamah Agung Filipina, didampingi oleh Rolando Javier, Lloyd Nicholas D. Vergara, dan Patricia Benilda S. Ramos.

Kejaksaan Provinsi Hebei, Tiongkok (*the People's Procuratorate of Hebei, P.R. China*)

Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui BSDK menerima kunjungan kerja delegasi Kejaksaan Provinsi Hebei, Tiongkok, pada 8 Desember 2025 di BSDK, Megamendung, Bogor, sebagai bagian dari penguatan kerja sama internasional di bidang pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan.

Kementerian Kehakiman Vietnam

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima kunjungan delegasi Kementerian Kehakiman Vietnam pada Kamis, 27 November 2025, di Tower Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, sebagai bagian dari upaya mempererat kerjasama kelembagaan dan pertukaran praktik terbaik dalam penegakan putusan perkara perdata serta transformasi digital peradilan. Delegasi dipimpin oleh Deputy Direktur Jenderal Departemen Eksekusi Perkara Perdata (*Civil Judgment Enforcement*), Ms. Tran Thi Phuong Hoa, dan diterima bersama jajaran pimpinan Mahkamah Agung, termasuk Sekretaris Mahkamah Agung, Plt. Panitera Mahkamah Agung, Kepala Badan Urusan Administrasi, dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.

Asia Pacific International Arbitration Chamber (APIAC)

Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima kunjungan delegasi Asia Pacific International Arbitration Chamber (APIAC) pada Rabu, 3 Desember 2025, bertempat di Ruang Wirjono Prodjodikoro, Gedung Mahkamah Agung. Delegasi APIAC dipimpin *President Assistant and Director of the Global Secretariat* dan *Director of Southeast Asia Development Center*, serta disambut oleh para Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung.

Ringkasan Eksekutif **Laporan Tahunan 2025**
Pengadilan Terpercaya,
Rakyat Sejahtera

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13
Jakarta Pusat - DKI Jakarta, Indonesia 10110
(021) 3843348, 3810350, 3457661
persuratan@mahkamahagung.go.id

